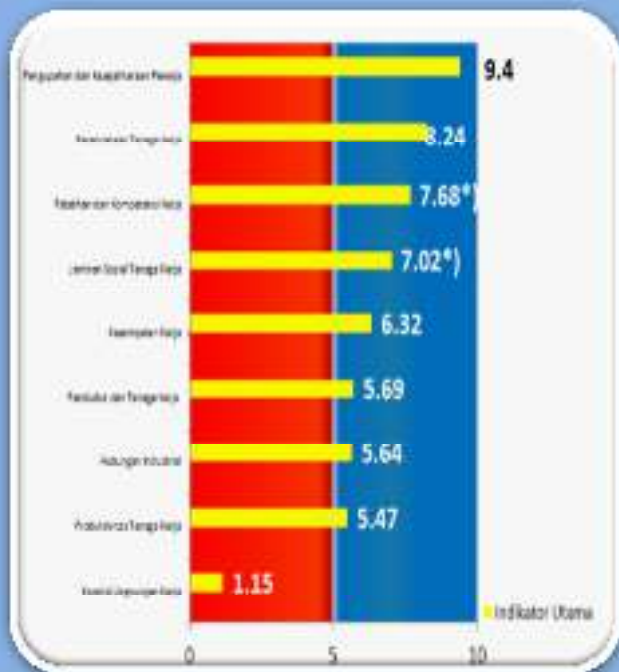




LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Ujung Gurun no.7 Padang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi, akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga sektor public (*public sector organization*) yang disusun berdasarkan Capaian Kinerja yang merupakan implementasi dari Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2016 -2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2020.

Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada public dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di masa yang akan datang serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja selanjutnya yang jauh lebih baik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dalam membantu penyusunan Laporan ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Padang, 29 Januari 2021
Kepala Dinas

NAZRIZAL, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19700114 198902 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat atas pencapaian visi, misi dan tujuan Instansi Pemerintah yang *good governance* sehingga terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja ini bertujuan Untuk melihat tingkat keberhasilan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja (keberhasilan dan kegagalan) yang berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi LAKIP / Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya dan kemudian menjadi Sasaran Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis
3. Meningkatnya Pembangunan kawasan transmigrasi
4. Meningkatnya Kemandirian Transmigran

Setelah dilakukan analisis sebagaimana yang dijelaskan secara rinci pada Bab III Laporan Kinerja ini, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara keseluruhan dengan 5 Sasaran dan 5 Indikator Kinerja yang diukur mendapat bobot sangat baik dengan rata-rata diatas 100% yaitu

112,35% dengan kategori **Sangat Baik**, dimana untuk pencapaian sasaran 1 nilai bobotnya adalah 108,55% (sangat baik), untuk pencapaian sasaran 2 bobot nilai 116,42% (sangat baik), untuk pencapaian sasaran 3 bobot nilai 100% (sangat baik), untuk pencapaian sasaran 4 bobot nilai 138% (sangat baik) dan untuk pencapaian sasaran 5 dengan bobot 98,80% (Baik)

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diantaranya 1). Persentase serapan tenaga kerja mencapai 58,27% dari target yang telah 53,68%. Kegiatan ini pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan bagi calon pencari kerja, kegiatan pemagangan dalam dan luar negeri serta pelatihan bagi calon tenaga kerja mandiri 2). Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dengan indikator kinerja persentase penurunan kasus ketenagakerjaan dicapai sebesar 36,03% dari target 43,11%. Ini merupakan target kinerja menurun dimana semakin kecil angka penurunan kasus ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan Pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan ke perusahaan dalam penerapatan peraturan Ketenagakerjaan di Sumatera Barat 3). Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi dapat direalisasikan sesuai dengan target 1 kawasan. Hal ini didukung dari pelaksanaan percepatan pembangunan di kawasan daerah tertinggal baik melalui APBD maupun APBN. Kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan SDM warga transmigran 4). Meningkatnya Indeks Kemandirian Transmigran dari target 50<IPKTrans<75 tercapai 50<IPKTrans<75, hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan bagi warga transmigran, peningkatan sarana dan fasilitas dalam mempermudah akses lokasi transmigran yang bersinergi dengan stakeholder terkait dan Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan akan meningkatkan kemandirian warga transmigran dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Meskipun tingkat pencapaian sasaran indikator di atas termasuk kategori sangat berhasil, namun masih banyak permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja.

Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain:

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga Pengawasan dalam melakukan kegiatan pengawasan ke perusahaan.

2. Masih belum optimalnya SDM calon pencari kerja baik untuk pelaksanaan pemagangan dalm dan luar negeri.
3. Masih terbatasnya jumlah Instruktur yang kompeten dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan permintaan pasar kerja
4. Masih belum otimalnya dukungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penganggaran program dan kegiatan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sinkronisasi dan Sinergisitas Program /Kegiatan dengan pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota.
2. Meningkatkan SDM masyarakat dan pencari kerja dalam hal ini melakukan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang sesuai dengan pasar kerja.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan dalam penerapan Peraturan – Perundang Undangan ketenagakerjaan dan meningkatkan perlindungan Tenaga kerja dalam upaya menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan
4. Memfasilitasi Sarana dan prasarana dikawasan Transmigrasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan warga transmigran.
5. Meningkatkan SDM Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan melalui Bimtek dan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja.
6. Meningkatkan SDM Tenaga Fungsional Instruktur dan Pengantar Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
7. Meningkatkan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
8. Melakukan pembinaan dan Pelatihan terhadap masyarakat guna meningkatkan Tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing.
9. Meningkatkan Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) melalui peningkatan Sarana dan prasarana yang representativ.

Dari berbagai upaya yang dilakukan dalam pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Sumatera Barat telah meraih penghargaan dari Kementerian



ketenagakerjaan yaitu : penghargaan Untuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Integra) Bidang Hubungan Industrial dan Pelatihan dan Kompetensi Kerja.

Untuk masa yang akan datang hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasaran kinerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat bekerja dan berkinerja lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

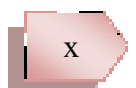
Kata Pengantar	Hal i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Gambaran Umum.....	4
1.5. Tugas dan Wewenang.....	7
1.6. Struktur Organisasi.....	10
1.7. Apek Sumber Daya Manusia (SDM).....	11
1.8. Sistematika Penyajian.....	13
II. PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	16
2.2. Program Prioritas.....	17
2.3. Program dan Kegiatan.....	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	24
B. Hasil Pengukuran Kinerja	26
C. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
D. Realisasi Anggaran	68
1. Realisasi Anggaran APBD.....	68
2. Realisasi Anggaran APBN	73
3. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	75
IV. PENUTUP.....	115

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel. 1.1. Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan usaha tahun 2017 -2020	5
Tabel 2.2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan (Desember 2020)	11
Tabel 2.2.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan (Desember 2020)	12
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan golongan (Desember 2020)	12
Tabel 2.2.4 Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja (Desember 2020)	13
Tabel 2.1 Matriks hubungan antara tujuan dan sasaran	15
Tabel 2.2. Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020	19
Tabel 2.3. Realisasi Program/kegiatan APBD tahun 2020	20
Tabel 2.4. Realisasi Program/Kegiatan APBN Tahun 2020	23
Tabel 3.1. Klasifikasi penilaian keberhasilan /Kegagalan pencapaian Sasaran Strategis tahun 2020	25
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020`	26
Tabel 3.3. Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 3.4. Capaian Renstra terhadap Indikator Tujuan I	28
Tabel 3.5. Realisasi Tujuan I	28
Tabel 3.6. Capaian Indikator sasaran I	29
Tabel 3.7. Hasil Pengukuran Capaian target indikator Kinerja Sasaran I Disnakertrans tahun 2020	31
Tabel 3.8. Hasil Pengukuran Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran I tahun 2018 sd 2020	32
Tabel 3.9. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target Renstra tahun 2021	33
Tabel 3.10. Perbandingan capaian kinerja Provinsi dengan capaian Nasional	32
Tabel 3.11. Serapan Tenaga Kerja sektor Formal tahun 2020	34
Tabel 3.12. Serapan Tenaga Kerja sektor Formal tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin	35
Tabel 3.13. Daftar lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi yang telah disertifikasi oleh BNSP tahun 2020	36
Tabel 3.14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera barat dan kabupaten/Kota tahun 2018 – 2020	37
Tabel 3.15. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran I	38
Tabel 3.16. Efisiensi penggunaan sumber daya	39
Tabel 3.17. Capaian Indikator sasaran II	41
Tabel 3.18. Hasil Pengukuran Capaian target Indikator Kinerja sasaran II Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera barat Tahun 2020	42
Tabel 3.19. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja Sasaran II tahun 2020	43

Tabel 3.20.	Perbandingan capaian kinerja Sasaran II dengan Target akhir renstra	43
Tabel 3.21.	Data jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020	45
Tabel 3.22.	Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran II	46
Tabel 3.23.	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	47
Tabel 3.24.	Capaian Indikator Tujuan II	48
Tabel 3.25.	Capaian Indikator Tujuan II terhadap target RPJMD tahun 2016-2021	49
Tabel 3.26.	Capaian Indikator sasaran III	50
Tabel 3.27.	Hasil Pengukuran Capaian target Indikator Kinerja sasaran I II Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera barat Tahun 2020	51
Tabel 3.28.	Hasil pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja sasaran III tahun 2018-2020	51
Tabel 3.29.	Perbandingan Capaian kinerja dengan target akhir Renstra	52
Tabel 3.30.	Perbandingan capaian kinerja dengan capaian nasional	52
Tabel 3.31.	Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran	55
Tabel 3.32.	Efisiensi Penggunaan Sumber daya	56
Tabel 3.33.	Capaian Kinerja Sasaran IV	56
Tabel 3.34.	Hasil pengukuran capaian target kinerja sasaran IV Disnakertrans Prov. Sumbar tahun 2020	58
Tabel 3.35.	Hasil Pengukuran Pencapaian target kinerja Sasaran IV Tahun 2018-2020	58
Tabel 3.36.	Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir tahun Renstra	59
Tabel 3.37.	Realisasi Program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran IV	60
Tabel 3.38.	Efisiensi Penggunaan Sumber daya	61
Tabel 3.39.	Capaian Indikator Tujuan III Tahun 2020	62
Tabel 3.40.	Target Indikator Kinerja Sasaran V	63
Tabel 3.42.	Capaian Indikator sasaran V	64
Tabel 3.43.	Hasil Pengukuran Capaian target Indikator Kinerja sasaran I V Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera barat Tahun 2020	64
Tabel 3.44.	Hasil Pengaturan pencapaian target Indikator Kinerja sasaran V Tahun 2018-2020	65
Tabel 3.45.	Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir renstra	66
Tabel 3.46.	Efisiensi penggunaan Sumber Daya	67
Tabel 3.47.	Analisis Akuntabilitas Keuangan, Realisasi Anggaran	68
Tabel 3.48.	Laporan Realisasi APBD sampai dengan Desember 2020 Disnakertrans	69
Tabel. 3.49.	Laporan Realisasi APBN sampai dengan Desember 2020 Disnakertrans	74
Tabel 3.50.	Realisasi PAD tahun 2020	75
Tabel 4.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera barat tahun 2018-2020	76

Tabel 4.2.	Tingkat Partidipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat Tahun 2019-2020	77
Tabel. 4.3.	Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Barat tahun 2019 – 2020	77
Tabel 4.4.	Data Kelembagaan Hubungan Industrial Sumatera Barat	78
Tabel 4.5.	Data Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020	78



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar. 1.1.	Gambar Bagan Sutruktur Organisasi	10
Gambar. 1.2.	Gambar pelaksanaan pelatihan di UPPTD BLK	30
Gambar. 1.1.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan (Desember 2020)	12
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan golongan (Desember 2020)	12

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih Berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Harapan ini diperkirakan akan memperkecil jumlah pengangguran dan setengah pengangguran pada tingkat yang wajar.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Instansi/Dinas diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Sumatera Barat. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Laporan kinerja sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, selain itu fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah oleh Pemerintah.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 44 Tahun 2017 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
14. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor.065/3979/ED/GSB-2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang penyampaian hasil Pengukuran Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.4. GAMBARAN UMUM

Pembangunan suatu negara ditujukan untuk kepentingan penduduk termasuk tenaga kerja yang menjadi objek pembangunan. Di saat yang bersamaan, sebagai subjek pembangunan, penduduk serta tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung di samping sumber daya lainnya, dan dapat mempengaruhi sumber daya lainnya. Penduduk merupakan *supply* bagi pasar tenaga kerja di suatu negara, namun hanya penduduk berusia kerja saja yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja, pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (*employment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi Sumatera Barat adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak seimbang pertumbuhannya angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan

(5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Mengamati perekonomian Sumatera Barat Triwulan-III tahun 2020 dibandingkan dengan Triwulan-III tahun 2019 terjadi penurunan sebesar -2,87 persen. Penurunan ini terjadi pada sebagian besar lapangan usaha kecuali lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,20 persen, Informasi dan Komunikasi 7,98 persen, Jasa Pendidikan sebesar 7,94 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,92 persen. Selama tahun 2020 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami penurunan tertinggi yakni sebesar 19,87 persen, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,28 persen serta Jasa Lainnya sebesar 13,66 persen

Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, juga turut terpengaruh oleh kondisi tersebut. Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

TABEL :
PENDUDUK 15 TAHUN KEATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA
TAHUN 2017 - 2020

NO	KEGIATAN UTAMA	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia Kerja	3.746.830	3.891.230	3.954.420	4.016.780
2	Angkatan Kerja	2.483.675	2.629.100	2.684.390	2.772.130
	- Bekerja	2.344.972	2.480.400	2.540.040	2.581.520
	- Pengangguran	138.703	148.700	144.350	190.610
3	Bukan Angkatan Kerja	1.263.155	1.262.130	1.270.030	1.244.640
	- Sekolah	418.369	421.950	393.050	393.050
	- Mengurus RT	692.806	656.760	685.350	685.350
	- Lainnya	151.980	163.570	172.400	172.400
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,29	67,56	67,88	69,01
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,58	5,66	5,38	6,88

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan melalui Misi ke 4 yakni “ ***Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.***” Sementara itu, kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Selain itu diharapkan pula terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak. Sedangkan pembangunan Bidang Ketransmigrasian diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, pembangunan perdesaan di wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah strategis dan cepat tumbuh serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada tahun 2020 menunjukkan perkembangan negative di pasar tenaga kerja Sumatera Barat. Hal ini digambarkan dengan naiknya jumlah angkatan kerja maupun jumlah pengangguran dan disertai dengan naiknya tingkat pengangguran dibandingkan kondisi Agustus 2019.

Sebagai informasi bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.581.520 jiwa. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2020 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP kebawah) sebanyak 51,92 persen, penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 32,37 persen sedangkan penduduk bekerja berpendidikan Tinggi sebanyak 15,71 persen.

Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja berpendidikan menengah meningkat sebesar 0,87 poin. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan rendah dan tinggia mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,45 poin dan 0,42 poin.

Tantangan terbesar dari dalam yaitu bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja kita agar memiliki daya saing di rumah sendiri menghadapi ancaman masuknya tenaga kerja asing serta berkemampuan untuk memasuki pasar kerja global. Disamping itu, kurangnya keterampilan kewirausahaan (entrepreneur) dari angkatan kerja, sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja baru. Tidak mudah menggeser struktur tingkat pendidikan tenaga kerja, butuh waktu cukup lama dan komitmen kita semua untuk mewujudkannya.

Di bidang Pelatihan bagaimana mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah dan Swasta yang ada untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan langsung dapat diserap oleh pasar kerja. Di bidang penempatan tenaga kerja, dituntut kreatifitas sehingga mampu diciptakan kesempatan kerja baru, efektifnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri dan mudahnya pengisian pasar kerja yang tersedia. Di bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, yang menjadi tantangan adalah memantapkan aturan ketenagakerjaan, mengelola akses dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan masalah alih daya (outsourcing), penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Di bidang Ketransmigrasian, tantangan juga terus semakin berat. Masalah pertanahan dengan segala aspeknya baik untuk perencanaan dan penempatan transmigrasi baru maupun yang masih dalam pembinaan. Begitu pula dengan ketersediaan sarana dan prasarana di permukiman dan kawasan transmigrasi, kualitas calon transmigran serta belum optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

1.5. TUGAS DAN WEWENANG.

Keberadaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

Tugas dan fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Tugas

Disnakertrans mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugasnya.

Sedangkan organisasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tata laksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat, yang dibantu oleh :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, yang dibantu oleh :

- Seksi Pelatihan Kerja.
- Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

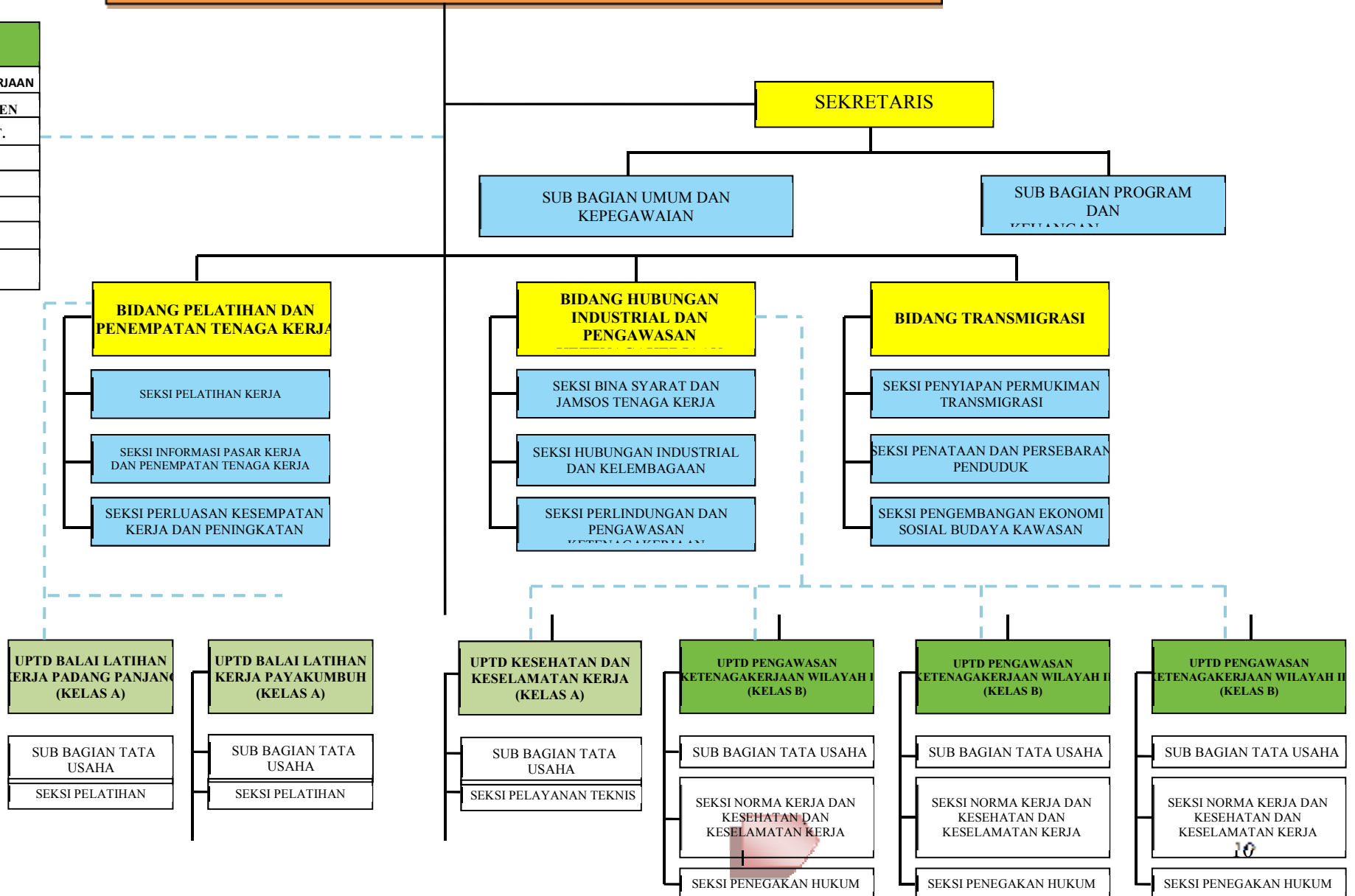
4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, yang dibantu oleh :

- Seksi Bina Syarat dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan
 - Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
5. Bidang Transmigrasi
- Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Transmigrasi, yang dibantu oleh :
- Seksi Penyiapan Permukiman transmigrasi
 - Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk
 - Seksi Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi
6. UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang dibantu oleh :
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pelayanan Teknis
7. UPTD BLK Payakumbuh, yang dibantu oleh :
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pelatihan
8. UPTD BLK Padang Panjang, yang dibantu oleh :
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pelatihan
9. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, yang dibantu oleh :
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Norma Kerja dan Kesehatan, Keselamatan Kerja
 - Seksi Penegakan Hukum
10. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, yang dibantu oleh :
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Norma Kerja dan Kesehatan, Keselamatan Kerja
 - Seksi Penegakan Hukum
11. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, yang dibantu oleh :
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Norma Kerja dan Kesehatan, Keselamatan Kerja
 - Seksi Penegakan Hukum

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TETENTU
1. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
2. INSTRUKTUR MANAJEMEN
3. INSTRUKTUR BALAI LAT.
4. PENGGERAK SWADAYA
5. PENGANTAR KERJA
6. MEDIATOR HUBUNGAN
7. TEKNISI LITKAYASA
8. PENGUJI K3



2. ASPEK SUMBERDAYA

Jumlah personil dan tata laksana Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 di dukung oleh 184 orang pegawai yang terdiri dari 183 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang pegawai harian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan (Desember 2020)

No	Jabatan	Jumlah (orang)	%
1.	Struktural :	26	14,13
	Esselon II	1	
	Esselon III	7	
	Esselon IV	18	
2.	Fungsional :	83	45,11
	- Mediator Hubungan Industrial	7	
	- Pengantar Kerja	12	
	- Pengawas Tenaga Kerja	31	
	- Penggerak Swadaya Masyarakat	5	
	- Instruktur	23	
	- Penguji K3	3	
	- Teknisi Litkayasa	1	
	- Pranata Komputer	1	
3.	Fungsional Umum	74	40,22
4.	Pegawai Harian	1	0,54
	Jumlah	184	100,00

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat yang menduduki jabatan struktural sebesar 14,13 %. Apabila dilihat dari komposisi beban kerja, pada umumnya telah sesuai dengan bidang tugas yang ada (pejabat struktural bidang Ketenagakerjaan sebanyak 22 orang, di bidang Ketransmigrasian sebanyak 4 orang. Namun apabila ditinjau berdasarkan beban kerja terutama pada jabatan struktural eselon IV, masih terdapat jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang tidak seimbang dengan yang seharusnya. Hal ini antara lain dikarenakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana terdapat beberapa tugas dan fungsi di tingkat eselon IV yang digabungkan ke dalam satu jabatan eselon IV sehingga terjadi kelebihan beban kerja. Demi efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, pada jenis-jenis jabatan tertentu yang mengalami kelebihan beban kerja diharapkan dilakukan evaluasi kelembagaan lebih lanjut.

Selain itu, terdapat 8 (delapan) jenis jabatan fungsional di lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan jumlah total 86 orang atau 40,95% dari seluruh pegawai. Meski dari segi kuantitatif nampak besar jumlahnya, namun saat ini Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala berupa semakin minimnya pejabat fungsional pada semua jenis jabatan, sehingga sangat tidak seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang memasuki usia pensiun, di samping adanya beberapa pejabat fungsional yang alih tugas menjadi pejabat struktural. Sebagai solusi atas minimnya pejabat fungsional bidang Ketenagakerjaan di Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui pengusulan PNS dengan jabatan calon fungsional di bidang Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI dan mengikuti diklat dasar fungsional kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Secara mandiri Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan upaya kaderisasi melalui penyelenggaraan diklat fungsional, yang dalam hal ini telah dilaksanakan khususnya untuk jabatan fungsional.

Tabel. 2.2.2
Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan (Desember 2020)

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Pasca Sarjana (S2)	28	16,39
2	Sarjana (S1)	98	53,55
3	Sarjana Muda (D3)	16	8,74
5	SLTA	36	19,67
6	SLTP	2	1,09
7	SD	3	1,63
	Jumlah	183	100

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai berpendidikan S1 yaitu sebesar 53,55% dari seluruh pegawai. Dengan demikian apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah ini sudah memadai dengan jenis pekerjaan yang ada.

Tabel 2.2.3
Jumlah berdasarkan Golongan (Desember 2020)

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	41	22,40
2	III	121	66,12
3	II	17	9,28
4	I	4	2,18
	Jumlah	183	100

Dilihat berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 66,12 % dari seluruh pegawai yang ada. Demikian pula halnya dengan golongan IV yang mencapai 22,40% dari seluruh pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu dilakukan pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang memiliki golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Desember 2020)

No	Unit Organisasi	Jumlah	%
1	Kepala	1	0,54
2	Sekretariat	30	16,39
3	Bidang Pelatihan dan Penempatan	26	14,21
4	Bidang HI WAS	12	6,56
5	Bidang Transmigrasi	18	9,83
6	UPTD Hiperkes	15	8,19
7	UPTD Pengawasan Wil. I	27	14,75
8	UPTD Pengawasan Wil. II	10	5,46
9	UPTD Pengawasan Wil. III	12	6,55
10	UPTD BLK Padang Panjang	16	8,74
11	UPTD BLK Payakumbuh	16	8,74
	Jumlah	183	100

Dilihat berdasarkan komposisi pegawai per unit kerja, dari 183 pegawai di lingkup Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 52,46 % berada di Unit Pelaksana dan (UPTD). Hal ini dikarenakan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat memiliki 6 (enam) UPTD yang menjadi ujung tombak pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

3. SISTIMATIKA PENYAJIAN.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan analisa terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Secara lebih rinci muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Bab. I. Pendahuluan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang sedang dihadapi, struktur organisasi, aspek sumber daya dan sistematika penyajian.

Bab. II. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang strategi dan penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Bab. III. Akuntabilitas Kinerja.

Menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan realisasi anggaran Tahun 2019.

Bab. IV. Penutup.

Menguraikan gambaran secara menyeluruh tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan kondisi yang diharapkan tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DISNAKERTRANS PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

2.1.1. TUJUAN

Dalam mendukung Kinerja Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan beberapa indikator sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan yang dituangkan di dalam Renstra SKPD yaitu :

1. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2. Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran
3. Meningkatnya kinerja organisasi

2.1.2. SASARAN STRATEGIS :

Dalam Mencapai Tujuan, perlu ditetapkan Sasaran Strategis dan dituangkan dalam Renstra Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2021 dengan indikator pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
3. Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi
4. Meningkatnya kemandirian transmigrans
5. Meningkatnya tata kelola organisasi

Secara lengkap dan rinci Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Matrik; Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja 2. Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis.	1. Persentase Serapan Tenaga Kerja 2. Jumlah Penurunan Kasus Ketenagakerjaan
2. Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran	1. Tingkat Kesejahteraan Transmigran	1. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2. Meningkatnya Kemandirian Transmigran	1. Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun 2. Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi
3. Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Kinerja Organisasi	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas



2.2. PROGRAM PRIORITAS

Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diwujudkan melalui 4 (empat) program prioritas utama beserta implementasi kegiatannya, yang meliputi :

a. Bidang Ketenagakerjaan

Terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yakni :

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional. Implementasi kegiatannya berupa :

- 1) Pengembangan standar kompetensi kerja dan pemberdayaan SDM kepelatihan dan instruktur.
- 2) Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- 3) Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan pemagangan.
- 4) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi lembaga pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat.
- 5) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
- 6) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan produktivitas.
- 7) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan pembinaan produktifitas.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha.

Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal secara produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa :

- a. Perluasan kesempatan kerja.
- b. Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri.
- c. Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
- d. Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja di dalam dan luar negeri.
- e. Penguatan kapasitas SDM antar kerja untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
- f. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia

1) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Untuk perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Implementasi kegiatannya berupa:

- ① Pembinaan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja.
- ② Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- ③ Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan.
- ④ Penguatan kapasitas SDM hubungan industrial untuk mendorong terwujudnya iklim hubungan industrial yang kondusif

4) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi kegiatannya berupa :

- ① Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan.
- ② Pembinaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
- ③ Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan ketenagakerjaan.

- (4) Pengkondisian lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat serta tenaga kerja yang sehat dan produktif di UPT K3.
- (5) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3

b. Bidang Ketransmigrasian.

5) Program Ketransmigrasian.

1. Untuk mendapatkan animo calon transmigran yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan.
2. Untuk menjembatani kepentingan daerah tujuan (penerima) maupun daerah pengirim yang tertuang dalam perjanjian formal (*MoU*).

Implementasi kegiatannya berupa :

- (1) Fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk daerah asal
- (2) Optimalisasi penempatan warga transmigran.
- (3) Pendidikan pelatihan warga transmigran dalam rangka penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan pendapatannya.

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	- Persentase serapan tenaga kerja	53,68%	58,27%	108,55%
2	Meningkatnya hubungan industri yang harmonis	- Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan	43,11%	36,03%	116,42%
3	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	- Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	2 kawasan	2 kawasan	100%
4	Meningkatnya kemandirian transmigran	- Indeks kemandirian kawasan transmigrasi	68< IPK trans <75	69< IPK trans <75	101%
5	Meningkatnya Kinerja organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas	BB	BB	Sangat baik

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun realisasi program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sbb.

Program dan Kegiatan APBD 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI		
			FISIK %	KEUANGAN	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,546,169,917	100.00	20,609,085,280	91.41
	BELANJA PEGAWAI	22,546,169,917	100.00	20,609,085,280	91.41
1	Belanja Gaji dan tunjangan	14,651,842,479	100.00	13,777,594,325	94.03
2	Tambahan penghasilan PNS	7,883,430,821	100.00	6,831,490,955	86.66
3	Insentif pemungutan retribusi daerah	10,896,617	-	-	-
II	BELANJA LANGSUNG	8,385,961,332	99.87	8,016,870,520	95.60
A	POKOK	4,480,881,720	100.00	4,282,928,206	95.58
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,427,769,018	100.00	2,272,212,570	93.59
1	Penyediaan jasa surat menyurat	53,287,744	100.00	47,864,152	89.82
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	560,620,445	100.00	473,546,600	84.47
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	1,318,307,904	100.00	1,264,750,801	95.94
4	Penyediaan alat tulis kantor	80,880,200	100.00	80,742,100	99.83
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47,819,125	100.00	47,613,825	99.57
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31,883,500	100.00	31,852,200	99.90
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13,090,000	100.00	13,090,000	100.00
8	Penyediaan makanan dan minuman	48,360,000	100.00	48,355,000	99.99
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	208,020,100	100.00	201,662,642	96.94
10	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	14,600,000	100.00	14,600,000	100.00
11	Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	50,900,000	100.00	48,135,250	94.57
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,362,896,752	100.00	1,334,336,336	97.90
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	422,923,400	100.00	414,705,686	98.06
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	251,823,352	100.00	250,640,500	99.53
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	155,000,000	100.00	141,968,900	91.59
4	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	42,700,000	100.00	42,532,500	99.61

5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan kantor	80,450,000	100.00	76,438,750	95.01
6	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	410,000,000	100.00	408,050,000	99.52
7	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	-	-	-	-
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	161,250,000	100.00	156,000,000	96.74
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	161,250,000	100.00	156,000,000	96.74
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	-
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	528,965,950	100.00	520,379,300	98.38
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	52,595,000	100.00	52,595,000	100.00
2	Penatausahaan keuangan SKPD	284,175,000	100.00	278,700,000	98.07
3	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	102,235,950	100.00	99,807,250	97.62
4	Pengolahan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	89,960,000	100.00	89,277,050	99.24
B	URUSAN	3,905,079,612	99.73	3,733,942,314	95.62
(1)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,541,031,562	100.00	2,427,300,308	95.52
1	Uji Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan	243,000,000	100.00	212,173,593	87.31
2	Pelatihan Wirausaha Baru Produktif	2,840,000	100.00	2,840,000	100.00
3	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	100,000,000	100.00	97,236,000	97.24
4	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Padang Panjang	1,358,507,700	100.00	1,317,062,757	96.95
5	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Payakumbuh	623,109,080	100.00	606,608,850	97.35
6	Monitoring program pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota	44,042,000	100.00	43,854,276	99.57
7	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	150,000,000	100.00	127,992,050	85.33
8	Penyiapan Calon Peserta Magang ke Jepang	19,532,782	100.00	19,532,782	100.00
(2)	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	333,941,300	96.80	290,683,263	87.05
1	Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/kota dan penetapan UMP	160,000,000	100.00	128,143,100	80.09
2	Bimtek Struktur Skala Upah	3,941,800	100.00	3,941,800	100.00
3	Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan di Kab/Kota	83,128,000	100.00	83,127,363	100.00
4	Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan	-	-	-	-

5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat perusahaan	73,500,000	100.00	73,500,000	100.00
6	Bimtek Tata Cara Pembuatan PP/PKB	-	-	-	-
7	Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Bipartit, Tripartit)	13,371,500	20.00	1,971,000	14.74
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DIVERIFIKASI USAHA	175,992,800	100.00	174,149,943	98.95
1	Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	1,671,000	100.00	1,671,000	100.00
2	Bimtek Perantara Kerja dan Pembinaan antar Perantara Kerja	1,417,000	100.00	1,417,000	100.00
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada Calon Pencari Kerja	29,776,000	100.00	29,776,000	100.00
4	Pengumpulan dan Pengolahan Data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00
5	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	75,000,000	100.00	74,897,750	99.86
6	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	67,128,800	100.00	65,388,193	97.41
7	Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Bursa Kerja	-	-	-	-
(4)	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA	523,910,000	100.00	513,731,505	98.06
1	Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) Di Perusahaan	-	-	-	-
2	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	201,000,000	100.00	197,138,080	98.08
3	Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan	28,000,000	100.00	27,775,300	99.20
4	Pembinaan dan Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award dan Zero Accident	74,800,000	100.00	74,769,100	99.96
5	Pengujian lingkungan kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja	73,060,000	100.00	72,820,000	99.67
6	Penanganan kasus ketenagakerjaan	50,000,000	100.00	44,363,175	88.73
7	Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	22,400,000	100.00	22,215,850	99.18
8	Gerakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan Kab/Kota	74,650,000	100.00	74,650,000	100.00
9	Peningkatan Mutu Laboratorium	-	-	-	-
10	Peningkatan SDM UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pengawas Ketenagakerjaan	-	-	-	-
(5)	PROGRAM PENGADAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM	-	-	-	-
1	Pemeliharaan Alat Labor	-	-	-	-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	-	-	-	-

(6)	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL	240,203,950	100.00	238,109,295	99.13
1	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi	71,000,000	100.00	70,949,650	99.93
2	Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	50,000,000	100.00	49,990,920	99.98
3	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi	61,583,000	100.00	61,583,000	100.00
4	Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi	9,385,350	100.00	9,385,350	100.00
5	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	48,235,600	100.00	46,200,375	95.78
(7)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	90,000,000	100.00	89,968,000	99.96
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi	90,000,000	100.00	89,968,000	99.96
	J U M L A H (I + I I)	30,932,131,249	99.93	28,625,955,800	92.54

a. Program dan kegiatan APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	
1	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	392.997.000	100	382.362.500	97,29	10.634.500
2	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	4.519.218.000	100	4.411.279.256	97,61	107.938.744
3	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	339.239.000	100	333.533.100	98,32	5.705.900
4	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.608.518.000	100	1.594.363.400	99,12	14.154.600
	Jumlah Total	6.899.972.000	100	6.721.538.256	97,96	138.433.744

BAB.III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi aktualisasi dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “**kinerja**” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Pada Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Adapun dalam

memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif.

Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Skor	Capaian	Keterangan
4	> 100 %	sangat baik
3	75 % - 100 %	baik
2	55 % - 74 %	cukup
1	< 55 %	kurang

b. Perbandingan persentase peningkatan

Medote ini untuk melihat persentase peningkatan realisasi setiap tahunnya yang di hitung dengan cara membandingkan realisasi sekarang lalu dengan realisasi tahun lalu dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{(\text{Realisasi Tahun Sekarang} - \text{Realisasi Tahun lalu})}{\text{Realisasi Tahun lalu}} \times 100$$

c. Kinerja semakin menurun semakin baik.

Metode ini merupakan persentase target menurun dimana semakin rendah realisasi dari target menunjukkan capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(\text{Target} - (- \text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100$$

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan 5 (lima) sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	- Persentase serapan tenaga kerja	53,68%	58,27%	108,55
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	- Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan	43,11%	36,03%	116,42
3.	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	- Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	2 kawasan	2 kawasan	100
4.	Meningkatnya kemandirian transmigran	- Indeks kemandirian kawasan transmigrasi	68< IPK trans <75	69< IPK trans <75	101,5
5.	Meningkatnya tata kelola organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas	BB (76%)	BB(75,10%)	98,80 (Baik)

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian ini akan menjelaskan secara rinci capaian kinerja SKPD yang meliputi capaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Strategis telah menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, yang terdiri dari :

Tabel 3.3 : Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Meningkatnya Serapan tenaga Kerja	1. Persentase serapan tenaga kerja
			2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis	2. Persentase penurunan kasus ketenagakerjaan
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran	Tingkat Kesejahteraan transmigran	1. Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	1. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun
			2. Meningkatnya kemandirian transmigran	2. Indeks kemandirian kawasan transmigrasi

pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan melalui capaian setiap Indikator Kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 secara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.	Tujuan I	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
-----------	-----------------	---

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan angkatan kerja. Keberhasilan Tujuan 1 (satu) yaitu Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diukur melalui keberhasilan atau capaian dari indikator kinerja tujuan I (satu) yaitu Tingkat partisipasi angkatan kerja dari target sebesar 67,50% sampai dengan akhir Renstra pada tahun 2021 telah terealisasi pada tahun 2020 sebesar 69,01% dengan capaian sebesar 102,24%

Tabel 3.4. Capaian Renstra terhadap Indikator Tujuan I

No	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Renstra sd tahun 2021	Realisasi tahun 2020	Capaian (%)
1	Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,50%	69,01%	102,24

Dari tabel 3.4. di atas, diharapkan target indikator tujuan pada akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 67,50% sudah melebihi tercapai.

Pencapaian indikator tujuan I 2020 juga mengalami peningkatan dari Tahun 2019, hal ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja sebagaimana pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Tujuan I

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi tahun 2019	Realisasi tahun 2020	poin 2019-2020' (%)
1	Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,88%	69,01%	1,13%

Sumber data : Rilis BPS Sumbar, Agustus 2020

Dari tabel 3.5. di atas, dapat lihat bahwa realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 69,01%, sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 67,88% realisasi ini mangalami peningkatan sebesar dari tahun 2019 sebesar 1,13%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 di peroleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja sebanyak 2.772.130 (69,01%) orang dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 4.016.780 orang , dengan rumus :

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

Untuk mencapai tujuan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur capaian dari suatu target kinerja, yaitu Sasaran (1) meningkatnya serapan tenaga kerja (2) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja persentase serapan tenaga kerja dan jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan dan evaluasi terhadap kedua sasaran di atas akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1.1.	Sasaran I :	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja
-------------	--------------------	--

Capaian Sasaran I Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan Indikator Persentase serapan tenaga kerja pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3. 6 berikut ini :

Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran I

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya serapan tenaga Kerja	- Persentase serapan tenaga kerja	53,68%	58,27%	108,55

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran I Meningkatnya Kesempatan Kerja dengan Indikator kinerja persentase serapan tenaga kerja sudah terealisasi melebihi target 53,68% dengan realisasi sebesar 58,27% (capaian 108,55% dengan kategori "Sangat Baik").

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran I meningkatnya serapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan serapan tenaga kerja. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja diantaranya adalah :

- Meningkatkan SDM Tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan Kerja. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) baik BLK Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. kegiatan pelatihan ini yang dilaksanakan pada 2 (dua) program yaitu program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program peningkatan kesempatan kerja dan Diversifikasi usaha. Target tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan kerja sebesar 30,80 %, tercapai sebesar 41,11%. Hal ini dapat dilihat dari target 8.283 orang yang dilatih terealisasi sebanyak 11.056 orang tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan telah lulus dengan menyandang sertifikat kompetensi.

Gbr. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan



- Meningkatkan serapan tenaga kerja yang kompeten melalui kegiatan pemagangan . Kegiatan pemagangan merupakan bagian dari pelatihan, dengan harapan kegiatan pemagangan akan meningkatkan serapan tenaga kerja yang sudah terlatih dan memiliki kompetensi dapat diterima pada dunia industri/dunia kerja baik secara formal maupun informal. Kegiatan pemagangan ini dilakukan pada perusahaan baik yang ada di dalam provinsi, luar provinsi bahkan luar negeri.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dalam rangka peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Target tenaga kerja yang berkompeten melalui pemagangan sebesar 1,93%, tercapai sebesar 1,93% dengan Capaian sebesar 100 % . Jumlah Calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan sebesar 520 orang. Bidang Pelatihan dan Penempatan mempunyai tugas untuk mendorong perusahaan agar melakukan pemagangan secara mandiri sehingga diharapkan kedepannya perusahaanlah yang akan memegang peran aktif dalam program magang kerja. Jumlah tenaga kerja lulusan magang dalam negeri secara mandiri pada tahun 2020 adalah sebesar 520 orang, sedangkan tenaga kerja lulusan magang ke luar negeri (magang ke Jepang) sebanyak 296 orang.



- Meningkatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi.

Target peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah dan Swasta yang terakreditasi sebesar 41,67 %, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebelumnya yang belum terakreditasi sebanyak 14,81 LPK sedangkan sampai tahun 2020 sudah terakreditasi sebanyak 30 LPK.

1.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	% Capaian	
1	Meningkatnya serapan tenaga	Persentase serapan tenaga kerja	55,40%	58,27%	108,55	Sangat Baik

Dari Tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran pada akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 55,40% sudah tercapai, Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja pada tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar 58,27% dengan tingkat capaian sebesar 108,55% , capaian ini dikategorikan sangat baik (> 100%). Keberhasilan dari capaian target Sasaran I ini diperoleh melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan keterampilan calon pencari kerja seperti pelatihan yang dilaksanakan di BLK, pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, pembinaan dan penyuluhan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) berupa kegiatan padat karya baik yang didanai oleh APBD maupun APBN.

1.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya.

Capaian Indikator Sasaran I jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2019 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2018 sd 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase serapan tenaga kerja	23.66%	27.87%	117.79%	55,40%	60,32%	112,45%	53,68%	58,27%	108,55%

Dari Tabel 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dan kenaikan Target Indikator dari tahun 2018 sd tahun 2020, hal ini disebabkan terjadinya rasionalisasi anggaran, dimana pada tahun 2018 s/d 2020 anggaran untuk mendukung kegiatan ini sangat tersedia sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan target, sedangkan pada tahun 2020 dimana terjadi kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia sehingga terjadi rasionalisasi anggaran pemerintahan yang cukup significant diperuntukkan untuk pemulihan dan recovery pandemic Covid-19. Hal ini menyebabkan target yang telah ditetapkan tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dilakukan revisi target yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

1.1.3. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan target Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir Renstra tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	Target Akhir Renstra 2021	Capaian sd 2020 terhadap Renstra 2021
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	58,27%	55,40%	105,18%

Dari tabel 3.9. di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Serapan Tenaga Kerja sebesar 15.671 orang (58,27%) dengan capaian sampai dengan akhir Renstra tahun 2021 sebesar 105,18% dan diharapkan akan terus meningkat pada Tahun 2021. Realisasi ini merupakan capaian serapan tenaga kerja dari sektor Formal sebanyak 4.055 orang (15,08%) dan sektor informal sebanyak 40 orang (0,15%).

1.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Tabel 3.10. Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Nasional	Capaian (%)
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	58,27%	67,77%	101,83

Dari tabel 3.10 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ikut memberikan kontribusi positif terhadap capaian target nasional, bahkan melebihi dari target Nasional (sebesar 101,83%).

1.1.5. Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase Serapan Tenaga Kerja dari target 53,68% terealisasi sebesar 58,27% dengan capaian 108,55% pada tahun 2020, dimana dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 26.895 orang maka sudah sebanyak 15.671 (58,27%) orang yang diterima/ditempatkan bekerja baik secara formal maupun non formal. Persentase serapan tenaga kerja ini di peroleh dari :

- Dari 26.896 orang pencari kerja terdaftar, terserap sebanyak 11.056 orang melalui pelatihan kerja (41,11%)
- Serapan melalui kegiatan pelatihan pemagangan sebanyak 520 orang dari 26.896 pencari kerja (1,93%)
- Serapan tenaga kerja sektor formal sebanyak 4.055 orang dari 26.896 orang pencari kerja (15,08%)
- Serapan tenagakerja sektor Informal sebanyak 40 orang dari 26.896 orang pencari kerja (0,15%)

Dari uraian di atas, maka dapat di sederhanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10. Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Serapan	Jumlah Pecari kerja terdaftar (orang)	Jumlah Terserap (orang)	Persentase
1.	Pelatihan Kerja	26.895	11.056	41,11
2.	Pelatihan Pemagangan		520	1,93
3.	Tenaga Kerja Sektor Formal		4.055	15,08
4.	Tenaga Kerja Sektor In Formal		40	0,15
	Jumlah	26.895	15.671	58,27

Sumber data : Bidang Latpen 2020

hal didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan pelatihan, pemagangan baik dalam dan luar negeri, peningkatan produktivitas, peningkatan pelayanan informasi bagi para calon pencari kerja dan peningkatan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja, serta meningkatkan UMKM dan kelompok masyarakat. Disamping itu juga dilakukan Sosialisasi dan pendampingan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di 19 Kabupaten / Kota, baik melalui dana APBD maupun APBN. Upaya – upaya ini mendukung peningkatan serapan tenaga kerja baik formal maupun non formal.

Tabel 3.11. Serapan Tenaga Kerja Sektor Formal Tahun 2020

No.	Uraian	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Antar Kerja Lokal (AKL)	4.850	4.091	84,35
2	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	200	364	182,00
3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	1.300	187	14,38
	Jumlah	6.350	4.642	73,10

Sumber data : Bidang Latpen 2020

Tabel 3.11 di atas menjelaskan bahwa dari target serapan tenaga kerja secara formal sebanyak 6.350 orang dapat direalisasikan sebanyak 4.642 orang dengan capaian 73,20%. Serapan tenaga kerja ini tersebar baik pada instansi Pemerintah, BUMD, Koperasi, BUMN, perusahaan swasta, badan usaha lainnya dan perorangan. Serapan tenaga kerja yang terdiri dari Antar Kerja Lokal (AKL) yaitu serapan tenaga kerja yang terdapat di dalam Sumatera Barat yaitu jumlah pencari kerja yang terdaftar yang diterima bekerja di perusahaan lingkup Sumatera Barat sebanyak 4.091 orang. Jumlah

pencari kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 364 orang yaitu jumlah pencari kerja yang diterima bekerja diluar provinsi Sumatera Barat seperti Jakarta, Jawa, Pekanbaru dan Batam, dalam hal ini masih didominasi oleh Daerah dengan jenis usaha pada bidang elektonika dan indutri. Jumlah pencari kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 187 orang yaitu jumlah pencari kerja terdaftar yang diterima bekerja di Negara lain, dalam hal ini masih didominasi oleh Negara Jepang dengan bidang usaha Pertanian dan industri.

Jika dilihat dari data pencari kerja yang ditempatkan jumlah laki-laki dan perempuan yang diterima bekerja seimbang, hal ini dapat dilikat dari data berikut :

Tabel 3.12. Serapan Tenaga Kerja Sektor Formal Tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin

No.	Uraian	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Antar Kerja Lokal (AKL)	2.126	1.965	4.091
2	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	101	263	364
3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	85	102	187
	Jumlah	2.312	2.330	4.642

Sumber data : Bidang Latpen 2020

Dari tabel 3.12 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penempatan tenaga kerja pada tahun 2020 antara laki-laki (2.312 orang) dan perempuan (2.330 orang) sangat seimbang. Jumlah serapan tenaga kerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 7.439 orang memang mengalami penurunan sebanyak 37,6% pada tahun 2020, Hal ini dipengaruhi oleh COVID-19 yang mana perusahaan banyak yang mengalami penutupan, pengurangan jumlah pekerja dan menunda perekrutmen tenaga kerja pada beberapa perusahaan.

Sedangkan untuk Target serapan tenaga kerja informal, dari semula ditargetkan sebanyak 2.884 orang karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini, maka target ini menjadi nol (tidak ditargetkan).

Disamping itu juga upaya peningkatan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sangat berpengaruh dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga mendapat meningkatkan serapan tenaga kerja. Di Sumatera Barat hingga tahun 2019, dari 320 LPK yang ada sudah sebanyak 220 LPK yang terakreditasi

dan 100 LPK yang akan di Akreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Pada tahun 2020 ini sudah terakreditasi LPK sebanyak 40 Lembaga Pelatihan Kerja baik pada BLK Pemerintah maupun LPK Swasta. Sebagaimana daftar terlampir

Tabel 3.13. Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi yang telah disertifikasi oleh BNSP Tahun 2020

NO	BLK/LPK	LOKASI	KELOMPOK	NO. STRUKTUR	NO. PAM	HEK/KEK	KEH/KEK	KEPTERANGAN	KETERANGAN	DDT
1	2000001	BLK BLK BOJOL	TEKNIK KOMPUTER	00700001	000001	00000001	00000001	TERAKREDITASI		
2	2000002	BLK BIKAN	TEKNIK SISTEM MOTOR	00700002	000002	00000002	00000002	TERAKREDITASI		
3	2000003	UPD BLK SAMBUNTO	TEKNIK SISTEM MOTOR	01700003	000003	00000003	00000003	TERAKREDITASI		
4	2000004	BLK PANANG AND KELOR KHAYAN	CHAMBER KOMPUTER	01700004	000004	00000004	00000004	TERAKREDITASI		
5	2000005	BLK BIKAN BIKAN	TEKNIK SISTEM MOTOR	02700005	000005	00000005	00000005	TERAKREDITASI		
6	2000006	UPD BLK KANTEN PRANG PASIRAN	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	03700006	000006	00000006	00000006	TERAKREDITASI		
7	2000007	EPT DALALABAN KELOR KAWONMAMAM	GARMEN APPAREL	04700007	000007	00000007	00000007	TERAKREDITASI		
8	2000008	LPK ARJANA	BAHASA JAWA	04700008	000008	00000008	00000008	TERAKREDITASI		
9	2000009	BLK PRAMAN PERMANIS	TEKNIK KOMPUTER	05700009	000009	00000009	00000009	TERAKREDITASI		
10	2000010	LPK REC 1 ROKOM	OPERATOR KOMPUTER	17000010	000010	00000010	00000010	TERAKREDITASI		
11	2000011	LPK PSMA SAIN	DESAIN GRAFIK	18000011	000011	00000011	00000011	TERAKREDITASI		
12	2000012	IKM'S INSTITUTE	MULTIMEDIA	19000012	000012	00000012	00000012	TERAKREDITASI		
13	2000013	LPK ARYAPRISMA	MANAJEMEN	20000013	000013	00000013	00000013	TERAKREDITASI		
14	2000014	LPK ANDALAM HUBUNG SERVICE	KOSELAHATAN KESEHATAN KEMUKAAN	20900014	000014	00000014	00000014	TERAKREDITASI		
15	2000015	LPK ANGGAM NARON	BAHASA JAWA	22000015	000015	00000015	00000015	TERAKREDITASI		
16	2000016	LPK ASIA TRAINING CENTER RAMANG	BAHASA JAWA	22000016	000016	00000016	00000016	TERAKREDITASI		
17	2000017	WELL WIN NUSANTARA	HOUSE KEEPER	07100017	000017	00000017	00000017	TERAKREDITASI		
18	2000018	LPK FORTUNA CENTER	TEKNIK HANDBPHONE	18000018	000018	00000018	00000018	TERAKREDITASI		
19	2000019	WYMAN PENDIRIAN BAHASA DAN KOMPUTER DWANSTY	BAHASA INGGRIS	00300019	000019	00000019	00000019	TERAKREDITASI		
20	2000020	LPK MANARA	OPERATOR KOMPUTER	23000020	000020	00000020	00000020	TERAKREDITASI		

NO	NO. STRUKTUR	LOKASI	KELOMPOK	NO. STRUKTUR	NO. PAM	HEK/KEK	KEH/KEK	KEPTERANGAN	KETERANGAN	DDT
21	2000021	LOKOGARITAMAMU CIMING	REKAM DAN PEMETARAN	19000021	000021	00000021	00000021	TERAKREDITASI		
22	2000022	LPK PADM BUMCA TAMUNAI	MULTIMEDIA	20000022	000022	00000022	00000022	TERAKREDITASI		
23	2000023	LPK ILMU TERATAI	MULTIMEDIA	20000023	000023	00000023	00000023	TERAKREDITASI		
24	2000024	CIPRAKARSA MASEHI	ADMINISTRASI PERKANTORAN	19000024	000024	00000024	00000024	TERAKREDITASI		
25	2000025	ESTITRAMBU CIMING	ADMINISTRASI PERKANTORAN	19000025	000025	00000025	00000025	TERAKREDITASI		
26	2000026	LPK BOSSY SALON	BAHASA JAWA	24000026	000026	00000026	00000026	TERAKREDITASI		
27	2000027	LPK EXCELLENT DOKIRAN	JARINGAN KOMPUTER	24000027	000027	00000027	00000027	TERAKREDITASI		
28	2000028	LPK AL-KATHIKAN DOKIRAN	TATA LUGAS	24000028	000028	00000028	00000028	TERAKREDITASI		
29	2000029	LPK KHAN JAWAN	BAHASA JAWA	24000029	000029	00000029	00000029	TERAKREDITASI		
30	2000030	ZUMPS BAKSUD	BAHASA JAWA	24000030	000030	00000030	00000030	TERAKREDITASI		
31	2000031	MULTI PLAZA	TEKNIK BERPERAKSIAN	14000031	000031	00000031	00000031	TERAKREDITASI		
32	2000032	LPK MARINI	DESAIN GRAFIK	03000032	000032	00000032	00000032	TERAKREDITASI		
33	2000033	LPK ILMU HASTAB COLLEGE	TEKNIK	25000033	000033	00000033	00000033	TERAKREDITASI		
34	2000034	LPK ASA MENDAKA	BAHASA JAWA	13000034	000034	00000034	00000034	TERAKREDITASI		
35	2000035	LPK NASE NALON	TATA LUGAS PERKANTORAN	25000035	000035	00000035	00000035	TERAKREDITASI		
36	2000036	BLK TAPAKUNAN	TEKNIK KOMPUTER	17000036	000036	00000036	00000036	TERAKREDITASI		
37	2000037	LPK SMART COLLEGE	TEKNIK KEMAHASISWAAN	13000037	000037	00000037	00000037	TERAKREDITASI		
38	2000038	CYNASTY COMPUTER	BAHASA INGGRIS	06000038	000038	00000038	00000038	TERAKREDITASI		
39	2000039	ABDI ALMUSM	BAHASA INGGRIS	04000039	000039	00000039	00000039	TERAKREDITASI		
40	2000040	WELL WIN NUSANTARA	KOSELAHATAN KESEHATAN KEMUKAAN	24000040	000040	00000040	00000040	TERAKREDITASI		

Sumber data : BNSP , 2020

Peningkatan serapan tenaga kerja melalui pelatihan oleh Lembaga pelatihan tenaga kerja (LPK) yang kompeten dilaksanakan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dimana pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11.056 orang yang dilakukan pelatihan baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota melalui anggaran APBD

dan APBN. Pelatihan dilaksanakan di 12 Kabupaten /Kota Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumatera Barat.

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilakukan baik APBD maupun APBN di Provinsi maupun Kabupaten / Kota hal ini berpengaruh terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan mengurangi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat. Pada tahun 2018 sd tahun 2019 tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat mengalami penurunan 5,66% menjadi 5,38% terjadi penurunan sebesar 0,28%. Namun pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat meningkat tajam menjadi 6,88% (terjadi peningkatan 1,7%), hal ini disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 yang tidak hanya melanda Indonesia, namun juga melanda dunia, sehingga banyak terjadinya PHK dan penutupan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Kondisi ini juga diperburuk dengan bertambahnya penduduk usia kerja yang memang belum bekerja. Banyaknya pekerja-pekerja asal Sumatera Barat yang bekerja di perantauan kembali ke Sumatera Barat karena kondisi Covid-19 yang menyebabkan mereka terpaksa berhenti bekerja, hal ini sangat mempengaruhi meningkatnya TPT Sumatera Barat. Kondisi ini terjadi diseluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Data ini merupakan akumulasi dari seluruh capaian Kabupaten/Kota SeSumatera Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TPT (%)		
		2018	2019	2020
1	KAB. KEP. MENTAWAI	2,31	2,92	3,98
2	KAB.PESISIR SELATAN	6,03	6,02	7,00
3	KAB.SOLOK	6,12	4,72	4,65
4	KAB.SIJUNJUNG	3,22	3,64	5,30
5	KAB.TANAH DATAR	4,01	3,20	4,79
6	KAB.PADANG PARIAMAN	7,03	6,08	8,13
7	KAB.AGAM	4,93	4,78	4,61
8	KAB.LIMA PULUH KOTA	2,73	2,30	3,03
9	KAB.PASAMAN	6,04	5,28	5,04
10	KAB.SOLOK SELATAN	5,84	4,91	5,62
11	KAB.DHARMASRAYA	4,02	5,06	5,31
12	KAB.PASAMAN BARAT	3,36	4,74	4,69
13	KOTA PADANG	9,29	8,74	13,64
14	KOTA SOLOK	6,03	7,06	8,35
15	KOTA SAWAHLUNTO	5,92	6,84	8,20

16	KOTA PADANG PANJANG	5,35	4,38	7,22
17	KOTA BUKITTINGGI	7,24	6,20	7,51
18	KOTA PAYAKUMBUH	3,95	4,13	6,68
19	KOTA PARIAMAN	5,82	5,48	5,73
SUMATERA BARAT		5,66	5,38	6,88

Sumber data : BPS Sumatera Barat

1.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan serapan tenaga kerja dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengantar kerja , instruktur pengajar serta fungsional Penggerak Swadaya masyarakat yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan anggaran APBN maupun APBD juga sangat menentukan pencapaian target kinerja. Pada Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.717.024.382,- dengan jumlah kegiatan 15 Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I

NO URUT	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KEUANGAN	
			(Rp.)	%
1	3	4	7	8
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.541.031.562	2.427.300.308	95,52
1	Uji Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan	243.000.000	212.173.593	87,31
2	Pelatihan Wirausaha Baru Produktif	2.840.000	2.840.000	100,00
3	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	100.000.000	97.236.000	97,24
4	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Padang Panjang	1.358.507.700	1.317.062.757	96,95
5	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Payakumbuh	623.109.080	606.608.850	97,35
6	Monitoring program pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota	44.042.000	43.854.276	99,57
7	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	150.000.000	127.992.050	85,33
8	Penyiapan Calon Peserta Magang ke Jepang	19.532.782	19.532.782	100,00
II	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DIVERIFIKASI USAHA	175.992.800	174.149.943	98,95
1	Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	1.671.000	1.671.000	100,00
2	Bimtek Perantara Kerja dan Pembinaan antar Perantara Kerja	1.417.000	1.417.000	100,00
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada Calon Pencari Kerja	29.776.000	29.776.000	100,00
4	Pengumpulan dan Pengelolaan Data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1.000.000	1.000.000	100,00
5	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	75.000.000	74.897.750	99,86
6	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	67.128.800	65.388.193	97,41
	JUMLAH	2.717.024.362	2.601.450.251	95,75

Sumber data : Disnakertrans Prov. Sumbar 2020

Sesuai dengan tabel 3.14 di atas program yang mendukung sasaran 1 (satu) Persentase peningkatan serapan tenaga kerja terdiri atas 2 (dua) program yaitu : (1). Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.541.031.562,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.427.300.308 (95,52%) dengan realisasi fisik sebesar 100% . (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi usaha dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 175.992.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 174.149.943,- (98,95%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Pagu Anggaran ini sangat

jauh berkurang jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya pandemic COVID-19 sehingga terjadi rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk penanganan Covid-19 ini. Dan Kebijakan ini juga merupakan kebijakan pusat dan berlakunya juga terhadap anggaran APBN 2020. Dari uraian di atas, maka tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian target kinerja Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 3.15

Tabel 3.15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capain Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja	105,18%	95,75%	109,85

Dari tabel 3.15 di atas, dapat dilihat bahwa Capaian kinerja Sasaran I (satu) yaitu Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dapat teralisasi sebesar 105,18% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,75% dengan tingkat efisiensi sebesar 109,85%. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan ini cukup efektif dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.

Pencapaian target kinerja ini juga didukung melalui program dan kegiatan yang di dani oleh APBN (kegiatan Dekonsentrasi) dan sinergisitas dengan Kabupaten/Kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta program peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi usaha sangat mendukung dan berdampak significant dalam pencapaian target kinerja sasaran I (satu) yaitu Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.

1.2.	Sasaran II :	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
-------------	---------------------	---

Sasaran Strategis kedua yang telah ditetapkan menjadi target Kinerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis. Sasaran ini adalah bagaimana melalui hubungan

industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja di Sumatera Barat dapat terjalin dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan, kasus-kasus ketenagakerjaan di Sumatera Barat tidak terjadi dan ini meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga iklim investasi yang baik dapat terlaksana.

Capaian Sasaran II Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan Indikator Jumlah Penurunan kasus ketenagakerjaan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16. Capaian Indikator Sasaran II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan	43,11%	36,03%	116,42

Dari Tabel 3.16 di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran II Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan Indikator jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan sudah terealisasi melebihi target 43,11% dengan realisasi sebesar 36,03% (capaian 116,42% dengan kategori "Sangat Baik"). Kinerja pada Sasaran II ini merupakan capaian menurun, dimana semakin kecil realisasi daripada target menunjukkan kinerja yang semakin baik.

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran II Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, upaya yang dilakukan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan dan sistem penanganan kasus yang telah diselesaikan .

1.2.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Kinerja , Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Meningkatnya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI I	% CAPAIAN	
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan	43,11%	36,03%	116,42	Sangat Baik

Dari Tabel 3.15 di atas Capaian Sasaran Strategis II Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan Indikator Kinerja persentase jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan dari target 43,11% dapat direalisasikan sebesar 36,03% dengan tingkat capaian sebesar 116,42% dengan kategori sangat baik (> 100%). Realisasi ini diperoleh dari :

- Jumlah Kepesertaan Tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dari 2.184.600 orang tenaga kerja, yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 198.473 orang (9,09%) (data dari Bidang HI-Was)
- Jumlah kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebanyak 1.352 perusahaan (16,29%) dari 8.300 perusahaan yang terdaftar. (data dari Bidang HI-Was)
- Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 sebanyak 28 perusahaan (10,65%) dari 263 perusahaan yang wajib SMK3. (data dari Bidang HI-Was)

hal ini tak lain dari upaya peningkatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap perusahaan – perusahaan dalam mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

1.2.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Capaian Indikator Sasaran II jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2017 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2018 sd 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis.	Persentase penurunan kasus ketenagakerjaan	-	-	-	60,52	49,27	118,59%	43,11%	36,03%	116,42%

Dari Tabel 3.16 di atas, dapat dilihat bahwa Pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja terjadi perubahan indikator kinerja menjadi persentase penurunan kasus ketenagakerjaan, hal ini berdasarkan evaluasi SAKIP oleh Biro Organisasi dan Manpower sehingga tahun 2018 belum merupakan target indikator kinerja. Dari tabel di atas juga digambarkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 sebesar 116,24% sedangkan tahun 2019 mencapai 118,24%, kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh COVID-19.

1.2.3. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan target Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir Renstra 2021	Capaian sd 2020 terhadap Renstra 2021
1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis.	Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan	36,03%	42,61%	84,56%

Dari tabel 3.17. di atas dapat dilihat bahwa Realisasi meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dengan indikator jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan sebesar 36,03% dengan capaian sampai dengan akhir Renstra tahun 2021 sebesar 84,56%.

1.2.4. Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Penurunan kasus ketenagakerjaan dengan capaian 116,42%, didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan pembinaan, monitoring, pengawasan ke setiap perusahaan yang ada di Sumatera Barat, Sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan dan pembentukan lembaga-lembaga yang diharuskan dalam suatu perusahaan sesuai Undang-undang ketenagakerjaan no. 13 tahun 2016 baik melalui dana APBD maupun APBN.

Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan dalam menegakan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pekerja. Pengawasan yang dilakukan oleh Tenaga fungsional Pengawas dan tenaga mediator yang dimiliki oleh Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sehingga kasus – kasus ketenagakerjaan yang terjadi dapat dikurangi atau diselesaikan dengan baik, hal ini terbukti berkurangnya 36,03% kasus ketenagakerjaan di Sumatera Barat.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan industrial yang harmonis diantaranya adalah :

- Meningkatkan hubungan industrial di perusahaan melalui :
 - Pengesahan Perjanjian Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan.
 - Pembentukan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit dan Tripartit di perusahaan dan menurunkan tingkat perselisihan hubungan industrial
 - Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM baik perusahaan maupun pekerja terhadap norma-norma ketenagakerjaan
 - Menurunkan perselisihan hubungan industrial di perusahaan
- Meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang kondusif di perusahaan
 - penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) melalui pengujian dan pemeriksaan terhadap perusahaan
 - Meningkatkan kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
 - Menurunkan kasus kecelakaan kerja
- Pengupahan dan kesejahteraan Pekerja, melalui Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Peningkatan kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

- Meningkatkan pengawasan pada perusahaan dalam penerapan Undang-undang ketenagakerjaan ke seluruh Kabupaten/kota yang dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan

Capain target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa capaian antara lain :

- Kabupaten Kota yang telah memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit hingga saat ini telah 14 Kabupaten/Kota dari 19 Kabupaten/Kota (73,68%). Upaya ini terus dilakukan hingga diharapkan 19 Kabupaten/Kota telah memiliki LKS Tripartit yang merupakan bagian penting dari Hubungan Industrial.
- Perusahaan harus membentuk LKS Bipartit yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara internal di perusahaan. Hingga saat ini telah terbentuk LKS Bipartit sebanyak 114 (20%) perusahaan dari 570 perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit.
- Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2020 mengalami pengurangan, dimana pada tahun 2019 jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 503.384 orang sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar 435.089 orang hal ini dikarenakan terdapatnya perusahaan jasa konstruksi yang menghentikan pesesertaan pekerja akibat Covid-19 sebagaimana pada tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.18. Data jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020

No.	Kantor Cabang	Akuisisi TK			Jumlah Terdaftar			
		PU	PBU	Total	PU	BPU	Jakon	Total
1	Padang	47.590	34.959	82.549	97.901	21.490	87.297	206.688
2	Bukittinggi	35.634	25.671	61.305	63.239	17.276	35.969	116.484
3	Solok	33.216	16.717	49.933	47.443	11.624	52.850	111.917
Total		116.440	77.347	193.787	208.583	50.390	176.116	435.089

Sumber Data : BPJS Ketenagakerjaan Sumbar 2020

- Pada tahun 2020 Kepatuhan perusahaan dalam melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 1.200 perusahaan dari 8.200 perusahaan yang ada (14,63%). Begitu pula terhadap perusahaan yang telah melaksanakan SMK3 sebanyak 649 perusahaan dari 4.012 perusahaan yang wajib melaksanakan SMK3 (16,18%). Kemudian sebanyak 480

perusahaan yang sudah disahkan Peraturan Perusahaan (PP) dan 239 perusahaan yang telah mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dari 3.872 perusahaan sesuai data WLK (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan).

- Pada tahun 2020 Sumatera Barat mendapat Penghargaan dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial dari kementerian Ketenagakerjaan.

Gambar. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020



1.2.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengawas ketenagakerjaan , mediator, litkayasa K-3 yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan ketersediaan anggaran yang cukup memadai baik melalui anggaran APBN maupun APBD. Pada Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dan Program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan tenaga kerja yang terdiri dari 12 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 857.851.300,-,

Anggaran ini masih dirasakan sangat kurang, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran akibat Covid-19. Namun capaian kinerja dapat dicapai dengan adanya dukungan dan sinergisitas Kabupaten/Kota dan Pusat. Secara Rinci Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran II dapat dijelaskan pada tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19. Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II

NO URUT	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KEUANGAN	
			(Rp.)	%
1	3	4	7	8
(2)	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	333.941.300	290.683.263	87,05
1	Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/kota dan penetapan UMP	160.000.000	128.143.100	80,09
2	Bimtek Struktur Skala Upah	3.941.800	3.941.800	100,00
3	Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan di Kab/Kota	83.128.000	83.127.363	100,00
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat perusahaan	73.500.000	73.500.000	100,00
5	Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Bipartit, Tripartit)	13.371.500	1.971.000	14,74
(4)	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA	523.910.000	513.731.505	98,06
1	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	201.000.000	197.138.080	98,08
2	Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan	28.000.000	27.775.300	99,20
3	Pembinaan dan Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award dan Zero Accident	74.800.000	74.769.100	99,96
4	Pengujian lingkungan kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja	73.060.000	72.820.000	99,67
5	Penanganan kasus ketenagakerjaan	50.000.000	44.363.175	88,73
6	Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	22.400.000	22.215.850	99,18
7	Gerakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan Kab/Kota	74.650.000	74.650.000	100,00
	JUMLAH	857.851.300	804.414.768	93,77

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa program yang mendukung sasaran strategis II (dua) Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan indikator kinerja Persentase jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan terdiri atas 2 (dua) program yaitu : (1). Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 333.941.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 290.683.263,- (87,05%) dengan realisasi fisik sebesar 96,80%. (2). Program Perlindungan tenaga kerja dan system pengawasan tenaga kerja dengan jumlah anggaran Rp. 523.910.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 513.731.505,- (98,06%) dengan realisasi fisik 100%.

Dari pelaksanaan kedua program di atas serta dukungan dari Anggaran APBN dan sinergisitas Kabupaten/Kota maka pencapaian target Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan indikator kinerja Persentase jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan cukup efisien dapat dicapai, dan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian target dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut :

Tabel 3.20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Persentase Penurunan Kasus Ketenagakerjaan	116,42%	93,77%	124,15%

Dari tabel 3.20 di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran II (dua) yaitu Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,77% telah mampu menghasilkan capaian kinerja Sasaran Strategis yang sangat baik di atas 100% yaitu 116,42% dengan tingkat efisiensi sebesar 124,15%.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya lain yang mendukung baik itu Kabupaten/Kota maupun program dan kegiatan melalui anggaran APBN sangat berpengaruh terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran II Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis antara pekerja dengan pemberi kerja/perusahaan dan menurunkan jumlah kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Sumatera Barat. Hal ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang menjadi tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Dengan tingginya serapan tenaga kerja akan berdampak pada pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat.

2.	Tujuan II	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran
-----------	------------------	---

Tujuan ke (II) dari target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dalam mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran.

Keberhasilan Tujuan II (Dua) yaitu meningkatnya kesejahteraan transmigran dapat diukur melalui pencapaian indikator tujuan yaitu tingkat kesejahteraan transmigran dimana dari target 75% yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 68% (dengan capaian 90,66%). Hal ini dapat dilihat dengan tabel berikut :

Tabel 3.21. Capaian Indikator Tujuan II

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi tahun 2019	Realisasi tahun 2020	Peningkatan (%)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran	Tingkat Kesejahteraan Transmigrasi	68%	69,00%	1,47%

Dari tabel 3.21 dapat dilihat bahwa Realiasi target Tujuan II Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 Meningkatkan kesejahteraan transmigran dengan indicator kinerja tingkat kesejahteraan transmigran terjadi peningkatan 1,47% dari realisasi tahun 2019 sebesar 68% menjadi 69% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif dalam mencapai target kinerja sampai dengan akhir masa RPJMD tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.22. berikut ini :

Tabel 3.22. Capaian Indikator Tujuan II terhadap target RPJMD 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir Renstra 2021	Capaian sd 2020 terhadap RPJMD2021
2	Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Tingkat Kesejahteraan Transmigrasi	69%	75%	92%

Dari Tabel 3.22 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi target indikator kinerja pada tujuan II Meningkatkan kesejahteraan Transmigran sebesar 69% dengan capaian 92%

dari target RPJMD 2021. diharapkan target 75% sampai akhir tahun 2021 akan dapat di capai. Pencapaian Tujuan II ini juga didukung dari realisasi dua Sasaran dan indikator kinerja yaitu (1) Sasaran Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi, dengan target indikator kinerja adalah jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun, (2). Sasaran Meningkatnya Kemandirian transmigran dengan indikator kinerja Indeks Kemandirian Transmigran , yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kedua Sasaran dan indikator kinerja secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

2.1.	Sasaran III :	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi
-------------	----------------------	--

Capaian Sasaran III Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi dengan target Indikator kinerja Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3. 23 berikut :

Tabel 3.23. Capaian Indikator Sasaran III

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
3.	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	2 kawasan	2 kawasan	100

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran III Meningkatnya pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Indikator kinerja Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibangun dari target 2 kawasan telah terealisasi 2 kawasan dengan capaian 100% kategori (Sangat Baik). Yang menjadi target pembangunan kawasan transmigrasi pada tahun 2020 adalah Kabupaten Sijunjung dengan lokasi transmigrasi di Padang Tarok Kabupaten Sijunjung dan Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran III Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan upaya program dan kegiatan, baik APBD

maupun APBN dan bersinergi dengan Kabupaten/Kota, Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah :

- Melakukan pembinaan sosial budaya dan ekonomi bersama lintas sektor terkait di lokasi transmigrasi
- Memfasilitasi jaminan hidup warga transmigrasi selama 5 (lima) tahun berturut-turut hingga masyarakat transmigran sudah dikatakan mandiri melalui anggaran APBN
- Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada warga transmigrasi dalam upaya peningkatan keterampilan rumah tangga
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi guna mempermudah akses perekonomian dan lainnya.
- Memfasilitasi kesehatan, agama dan pendidikan terhadap warga transmigrasi.

Gbr. Melakukan Pembinaan dan fasilitasi sarana kebutuhan bagi warga transmigran



2.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Kinerja, target dan realisasi kinerja Sasaran III Meningkatnya kemandirian Transmigran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24. Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran III Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
3.	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	2 kawasan	2 kawasan	100	Sangat Baik

Dari Tabel 3.24 di atas Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari target 1 kawasan telah terealisasi sebanyak 1 kawasan dengan capaian 100% dan kategori sangat baik. Untuk Bidang Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah penerima, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN sudah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk peningkatan pendapatan warga di kawasan transmigrasi.

2.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya.

Capaian Indikator Sasaran III jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2018 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.25 berikut :

Tabel 3.25. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2018 sd 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang dibangun	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan	1 kawasan	100%	2 kawasan	2 kawasan	100%

Dari tabel 3.25 di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018 sd tahun 2020 capaian kinerja Sasaran III Meningkatnya pembangunann kawasan transmigrasi sangat baik dengan tingkat capaian 100%.

2.1.3. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran III Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2020 yang juga merupakan bagian dari target Renstra Dinas tahun 2016 sd 2021 dalam mendukung capaian RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.26. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir Renstra 2021	Capaian sd 2020 terhadap RPJMD2021
3	Meningkatnya Pembangunan Kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun	2 kawasan	2 kawasan`	100%

Dari Tabel 3.26 di atas, dapat dilihat bahwa Target Kinerja Sasaran III Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi sudah sesuai target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD 2021 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

2.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Tabel 3.27. Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Nasional	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun	2 kawasan	92 kawasan	1,1%

Dari tabel 3.27 di atas, menunjukkan bahwa Sasaran Strategis III Meningkatnya pembangunan kawasan Transmigrasi dengan indikator kinerja jumlah kawasan transmigrasi dapat direalisasikan sesuai target yaitu Kawasan namun jika dibandingkan dengan target nasional yang menetapkan target sebanyak 92 kawasan, maka Sumatera Barat merupakan 1,1% dari target secara nasional. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan transmigrasi sangat tergantung dari inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai lokasi transmigrasi, sedangkan Provinsi dalam hal ini hanya melakukan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi dalam penyiapan kawasan transmigrasi. Proses penyiapan kawasan transmigrasi dimulai dari perencanaan, pembangunan dan pengembangan secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dimana mulai dari penyiapan, kewenangan Provinsi adalah selama 1,5 tahun, kewenangan Pusat adalah 1,5 tahun dan kewenangan Kabupaten/kota adalah 2

tahun. Setelah kawasan transmigrasi mencapai pada posisi kota mandiri, maka sepenuhnya akan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Pencapaian kinerja sasaran III ini disamping melalui kegiatan APBD, dukungan Kementerian Desa Pembangunan dan Daerah tertinggal dan transmigrasi melalui dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) juga sangat membantu dalam pencapaian target kinerja.

2.1.5. Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun dengan capaian 100% sangat didukung oleh capaian pelaksanaan program dan kegiatan, baik melalui APBD maupun APBN. Kegiatan pembinaan pada lokasi transmigrasi yang secara berkelanjutan diberikan kepada 191 warga transmigran, monitoring dan koordinasi lintas sektor terkait ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara berkala, Pembangunan sarana dan prasarana dalam upaya mengakses kelokasi transmigran, melakukan fasilitasi pemberian jaminan hidup (Jadup) dari Kementerian Disamping itu sinergisitas program dan kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota terus dilakukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan program. Hingga sekarang terdapat 191 kk warga transmigran di Padang Tarok Kabupaten Sijunjung yang merupakan transmigrans dari daerah Yogyakarta.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Indeks kemandirian transmigran dengan capaian 90,66%, didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan pembinaan, monitoring dengan lintas sektor terkait, fasilitasi pemberian jaminan hidup selama 5 tahun dari kementerian, dan peningkatan serta pengembangan sarpras baik melalui dana APBD maupun APBN. Pada Tahun 2019 Sumatera Barat telah melakukan penempatan terhadap 191 warga transmigran yang berasal dari provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sehingga untuk tahun 2020 kegiatan yang dialokasikan merupakan kegiatan pembinaan, peningkatan SDM bagi warga transmigrans, Kegiatan ini juga didukung oleh kegiatan APBN baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kemandirian Transmigran dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga penggerak Swadaya masyarakat, SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan ketersediaan anggaran yang cukup memadai baik melalui anggaran APBN maupun APBD. Pada Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan anggaran sebesar Rp. 240.203.950,- dengan jumlah kegiatan 5 (lima) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.28. Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran

NO URUT	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KEUANGAN	
			(Rp.)	%
1	3	4	7	8
(6)	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAINFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL	240.203.950	238.109.295	99,13
1	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi	71.000.000	70.949.650	99,93
2	Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	50.000.000	49.990.920	99,98
3	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi	61.583.000	61.583.000	100,00
4	Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi	9.385.350	9.385.350	100,00
5	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	48.235.600	46.200.375	95,78
	JUMLAH	240.203.950	238.109.295	99,13

Sesuai dengan tabel 3.28 di atas program yang mendukung sasaran III (tiga) Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 240.203.950,- realisasi keuangan sebesar Rp. 238.109.295,- (99,13%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Dampak dari pencapaian Indikator Persentase Peningkatan pendapatan masyarakat pada kawasan transmigrasi berpengaruh meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dikawasan transmigrasi dan pengembangan masyarakat trasnmigrasi. Melalui Anggaran APBN selama 5 (lima) tahun Pemerintah masih mengalokasi anggaran untuk menjamin kehidupan warga transmigran berupa pemberian Jadup (jaminan Hidup) berupa beras dan bahan pokok lainnya serta pembangunan sarana dan prasarana fasilitas dikawasan transmigrasi, hal ini dilakukan hingga warga transmigran benar – benar sudah mandiri dan mampu menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Tabel 3.29. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capain Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transimgrasi yang dibangun	100%	99,13%	100,9%

Sumber data : Disnakertrans Prov. Sumbar 2020

Dari tabel 3.29 di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program/kegiatan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal cukup efisien terhadap penyerapan anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi. Dimana dengan serapan keuangan 99,13% dapat mencapai kinerja melebihi target (100,9%).

2.2.	Sasaran IV :	Meningkatnya Kemandirian Transmigran
-------------	---------------------	---

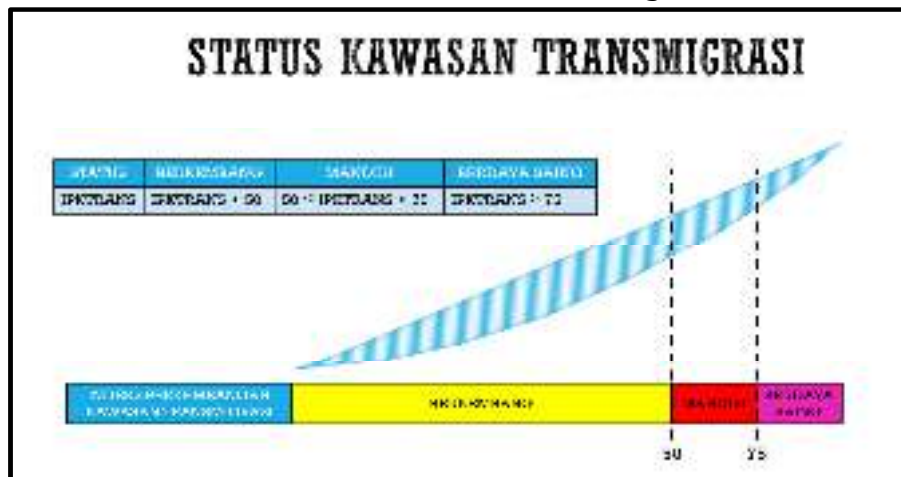
Capaian Sasaran IV Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi dengan target Indikator kinerja Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut :

Tabel 3.30. Capaian Indikator Sasaran IV

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kemandirian Transmigran	Indeks Kemandirian Transmigran	50 < IPK trans < 75	69 < IPK trans < 75	138

Dari Tabel 3.30 di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran IV Meningkatnya Kemandirian Transmigran dengan Indikator kinerja Indeks kemandirian Transmigrasi dari target 50 < IPK trans < 75 telah terealisasi 69 < IPK trans < 75 dengan capaian 138% kategori (Sangat Baik). Yang menjadi dasar penentuan target indeks adalah tahapan pelaksanaan pembangunan pada kawasan dan warga transmigrasi, baik dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengembangan sehingga pada akhirnya akan menjadi kota atau desa baru yang mandiri.

Gbr : Status Kawasan Transmigrasi



Sumber : Kemendes dan Trans

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran IV Meningkatnya Indeks kemandirian transmigrasi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan upaya program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN

dan bersinergi dengan Kabupaten/Kota, Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah :

- Melakukan pembinaan sosial budaya dan ekonomi bersama lintas sektor terkait di lokasi transmigrasi
- Memfasilitasi jaminan hidup warga transmigrasi selama 5 (lima) tahun berturut-turut hingga masyarakat transmigran sudah dikatakan mandiri melalui anggaran APBN
- Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada warga transmigrasi dalam upaya peningkatan keterampilan rumah tangga
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi guna mempermudah akses perekonomian dan lainnya.
- Memfasilitasi kesehatan, agama dan pendidikan terhadap warga transmigrasi.

2.2.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Kinerja, target dan realisasi kinerja Sasaran IV Meningkatnya kemandirian Transmigran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31. Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
4.	Meningkatnya Kemandirian Transmigran	Indeks Kemandirian Transmigrasi	50<IPKtrans<75	69<IPKtrans<75	138%	Sangat Baik

Dari Tabel 3.31 di atas Capaian Indikator Kinerja Indeks kemandirian Transmigrasi dari target 50<IPKtrans<75 terealisasi 69<IPKtrans<75 dengan capaian 138%. Untuk Bidang Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah penerima, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN sudah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk peningkatan pendapatan warga di kawasan transmigran.

2.2.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya.

Capaian Indikator Sasaran IV jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2017 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.32 berikut :

Tabel 3.32. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran IV Tahun 2018 sd 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya Kemandirian Transmigran	Indeks Kemandirian Transmigrasi	-	-	-	50<IPKtrans<75	68<IPKtrans<75	136%	50<IPKtrans<75	69<IPKtrans<75	138%

Dari tabel 3.32 di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018 sd tahun 2020 capaian kinerja Sasaran IV Meningkatnya kemandirian transmigrans sangat baik dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2018, Indikator Indeks Kemandirian Transmigrans belum menjadi target, sehingga belum dilakukan pendataan. Berdasarkan hasil pembahasan dan koreksi dari Biro Organisasi dan Inspektorat, maka pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan indikator.

2.2.3. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran IV Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi pada tahun 2020 yang juga merupakan bagian dari target Renstra Dinas tahun 2016 sd 2021 dalam mendukung capaian RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.33 berikut :

Tabel 3.33. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir Renstra 2021	Capaian sd 2020 terhadap RPJMD2021
4	Meningkatnya kemandirian transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	69<IPKtrans<75	70<IPKtrans<75	98,6%

Dari Tabel 3.33 di atas, dapat dilihat bahwa Target Kinerja Sasaran IV Meningkatnya Kemandirian Transmigrasi sudah mencapai 98,6% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD 2021 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

2.2.4. Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Jumlah Indeks Kemandirian Transmigrasi yang dibangun dengan capaian 138% sangat didukung oleh capaian pelaksanaan program dan kegiatan, baik melalui APBD maupun APBN. Kegiatan pembinaan pada lokasi transmigrasi yang secara berkelanjutan diberikan kepada 191 warga transmigran, monitoring dan koordinasi lintas sektor terkait ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara berkala, Pembangunan sarana dan prasarana dalam upaya mengakses kelokasi transmigran, melakukan fasilitasi pemberian jaminan hidup (Jadup) dari Kementerian Disamping itu sinergisitas program dan kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota terus dilakukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan program.

Tabel 3.30. Perhitungan pencapaian kinerja

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
A	Dimensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi	1 Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi	1
		2 Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan	2
		3 Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama mengembangkan komoditas unggulan	1
		4 Pengembangan Jejaring Kawasan Transmigrasi Kluster	1
		5 Promosi Komoditas Unggulan oleh Kawasan Transmigrasi/Kluster	2
		6 Sertifikasi/Standarisasi Produk yang dihasilkan	1
		7 Tingkat Melek Keuangan Masyarakat	2
		8 Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan	1
Total Skor A			11
B	Dimensi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi	1 Kreativitas Masyarakat	2
		2 Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya	1
		3 Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	1
		4 Migrasi Penduduk Keluar Kawasan	2
		5 Governansi Budaya	2
		6 Budaya dan Pendidikan	2
		7 Budaya, Informasi dan Pengetahuan	1
		8 Budaya dan Perencanaan	1
		9 Budaya, Keteraturan dan Inklusif Sosial	2
		10 Kekerabatan Sosial	2

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
Total Score B			16
C	Dimensi Lingkungan Kawasan Transmigrasi	1 Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mengacu Pada Tata Ruang Kawasan Transmigrasi 2 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3 Pemanfaatan Amenity Resources Untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial 4 Kesadaran Masyarakat Terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan 5 Adaptasi terhadap perubahan iklim 6 Kapasitas Mitigasi Bencana 7 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 8 Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah	2 2 1 2 1 1 1 1
Total Score C			11
D	Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi	1 Konektivitas Kawasan Transmigrasi dengan Kota Kecil/ menengah (pusat pertumbuhan) yang hirarki keruangannya lebih tinggi 2 Konektivitas antar SKP dalam kawasan transmigrasi 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan 5 Aksesibilitas ke dan dari kawasan serta ke sentra komoditas unggulan 6 Angkutan Umum 7 Elektrifikasi Kawasan Transmigrasi 8 Pemanfaatan alat komunikasi dan internet 9 Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 10 Ketersediaan Bahan Bakar 11 Kias Sarana Produksi Pertanian 12 Pasar Kawasan Transmigrasi 13 Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan bulan Bank untuk pengembangan komoditas Unggulan	2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
Total Score D			20
E	Dimensi Kelembagaan Kawasan Transmigrasi	1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau norma masyarakat dalam meminimalisasi dilih fungsi lahan 2 Kebijakan daerah tentang penggunaan tenaga kerja 3 Pengembangan Kawasan Transmigrasi /Kluster Berbasis Komoditas Unggulan 4 Insentif / kebijakan daerah tentang investasi di 5 Forum pengembangan (ekonomi) Daerah /kawasan transmigrasi di aras kabupaten/kota 6 Kebijakan daerah dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan 7 Komitmen Daerah untuk pembiayaan PKP yang telah ditetapkan 8 Kebijakan daerah tentang CSR untuk Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan 9 Pengembangan Kerjasama antar pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan 10 Kebijakan daerah tentang promosi kawasan	2 1 1 1 1 2 1 0 1 1
Total Score E			11
Total A + B + C + D + E			69

Sumber data : data diolah Bid. Transmigrasi, 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi Indeks Kemandirian Kawasan transmigrasi 69% ditentukan dari tingkat sarana dan prasarana yang telah dibangun/tersedia, keterlibatan dan kepedulian stakeholder/pemangku kepentingan dalam peningkatan dan pengembangan kawasan transmigrasi, penguatan kelembagaan yang ada, tingkat kreativitas dan inovasi warga trans, kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan secara mandiri sehingga mampu memiliki komoditi unggulan tersendiri dan lain-lainnya yang tidak terlepas dari peran serta Pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kabupaten/kota itu sendiri.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan perkembangan kawasan transmigrasi yang telah dibangun perlu diukur keberhasilannya sehingga dapat ditentukan status untuk pengembangan ekonomi wilayah di masa datang.

Pengukuran status kawasan dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah yang diwakili dalam dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jaringan prasarana dan sarana dan kelembagaan yang membentuk indeks komposit sehingga diperoleh indeks perkembangan transmigrasi di kawasan transmigrasi Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan sebesar 69 (mandiri), artinya dari semua indikator dimensi telah berfungsi dan masih perlu peningkatan dalam pemenuhannya di masa mendatang sehingga tercipta kota mandiri di kawasan transmigrasi dan masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut sudah dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Indeks kemandirian transmigran dengan capaian 138%, didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan dengan capaian fisik 100% dan keuangan 99,13%.

2.2.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kemandirian Transmigran dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga penggerak Swadaya masyarakat, SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan ketersediaan anggaran yang cukup memadai baik

melalui anggaran APBN maupun APBD. Pada Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan anggaran sebesar Rp. 240.203.950,- dengan jumlah kegiatan 5 (lima) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.34. Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran IV

NO URUT	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KEUANGAN	
			(Rp.)	%
1	3	4	7	8
(6)	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAINFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL	240.203.950	238.109.295	99,13
1	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi	71.000.000	70.949.650	99,93
2	Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	50.000.000	49.990.920	99,98
3	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi	61.583.000	61.583.000	100,00
4	Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi	9.385.350	9.385.350	100,00
5	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	48.235.600	46.200.375	95,78
	JUMLAH	240.203.950	238.109.295	99,13

Sesuai dengan tabel 3.34 di atas program yang mendukung sasaran III (tiga) Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 240.203.950,- realisasi keuangan sebesar Rp. 238.109.295,- (99,13%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Dampak dari pencapaian Indikator Persentase Peningkatan pendapatan masyarakat pada kawasan transmigrasi berpengaruh meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dikawasan transmigrasi dan pengembangan masyarakat trasnmigrasi. Melalui Anggaran APBN selama 5 (lima) tahun Pemerintah masih mengalokasi anggaran untuk menjamin kehidupan warga transmigran berupa pemberian Jadup (jaminan Hidup) berupa beras dan bahan pokok lainnya serta pembangunan sarana dan prasarana fasilitas dikawasan transmigrasi, hal ini dilakukan

hingga warga transmigran benar – benar sudah mandiri dan mampu menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Tabel 3.35. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capain Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Transmigrasi	100%	99,13%	100,9%

Dari tabel 3.35 di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program/kegiatan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal cukup efisien terhadap penyerapan anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi.

Dari Uraian Di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan Kegiatan baik APBD maupun APBN serta sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota sangat mempengaruhi keberhasilan indeks kemandirian transmigrasi. Upaya-upaya peningkatan SDM, pembinaan dan peningkatan pembangunan fasilitas dikawasan transmigrasi sangat mendukung dalam percepatan kawasan transmigrasi menjadi kawasan yang mandiri.

3.	Tujuan III	Meningkatnya kinerja organisasi
-----------	-------------------	---------------------------------

Keberhasilan Tujuan III ini dapat diukur melalui capaian indikator kinerja organisasi dengan sasaran strategis Meningkatnya kinerja Organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36. Capaian Indikator Tujuan III Tahun 2020

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi	Target Akhir Renstra 2021	Capaian sd 2019 terhadap Renstra 2021
5	Meningkatnya tatakelola organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (73,00%)	BB (80%)	91,25%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Indikator Tujuan peningkatan tata Kelola Organisasi sebesar 73,00 (BB) hal ini disebabkan adanya perbaikan secara berkelanjutan baik terkait penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja dan perbaikan dalam penyusunan laporan, disamping itu juga monitoring secara intern dalam pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran juga mendukung pencapaian peningkatan realisasi target kinerja.

3.1.	Sasaran V	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
-------------	------------------	--

Untuk mencapai Tujuan III, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 3.37. Target Indikator Kinerja sasaran V

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Sumber data : Disnakertrans Prov. Sumbar 2020

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat ukur dan prosedur yang telah dirancang dan disusun untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi yang telah berorientasi pada outcome dan upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Indikator pengukuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 35%
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
- c. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15%
- d. Evaluasi Kinerja dengan bobot 10%
- e. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%

Pada tahun 2019, nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai BB (73,00%) dari target BB (74,00%). Perolehan ini tidak lain adalah dari capaian seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun, baik itu capaian program dan kegiatan, capaian kinerja, dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diharapkan capaian nilai Laporan Kinerja pada tahun 2018 ini akan lebih baik.

Indikator Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik pengelolaan Program/ keuangan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas dengan target $\geq 95\%$.

Tabel 3.38. Capaian Indikator Sasaran V

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	Baik

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran IV Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari target BB terealisasi BB dengan capaian sangat baik. Sedangkan Indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas sudah terealisasi sesuai target 95% dengan realisasi sebesar 95,28% (capaian 100% dengan kategori "Sangat Baik").

3.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Kinerja , Target dan Realisasi Kinerja Sasaran IV Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39. Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)	
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	Sangat baik	Sangat baik

Dari Tabel 3.16 di atas Capaian Indikator Kinerja Persentase nilai evaluasi Akuntabilitas dari target BB terealisasi BB dengan capaian 98,64% (kategori "Baik"), sedangkan untuk capaian indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas dari target 95% dapat direalisasikan 95,28% dengan capaian 100,29% (kategori "sangat baik").

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Capaian Indikator Sasaran IV jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2020 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.33 berikut :

Tabel 3.40. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran IV Tahun 2018 sd 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)

5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (73%)	BB (72,14%)	98,82%	BB (74)	BB (73)	98,65%	BB (76)	BB (75,10)	98,80%
---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	--------	---------	---------	--------	---------	------------	--------

Dari Tabel 3.40 di atas, dapat dilihat bahwa target indicator sasaran V dapat terealisasi dengan baik dimana untuk Indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas dari tahun 2018 s/d 2020 dapat terealisasi dengan baik dengan capaian di atas 90% sedangkan untuk target indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan dapat terealisasi melebihi sesuai target. Setiap tahunnya dari tahun 2018 sd 2020.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 berdasarkan target Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.41. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra 2021	Capaian sd 2018 terhadap Renstra 2021
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75,10%)	BB (79.00%)	95,1%

Dari tabel 3.41. di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran V dari target Akhir Renstra Tahun 2021 dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas sebesar 95,1% dan indikator Persentase capaian Realisasi keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas. Diharapkan Capaian dari kedua indikator Sasaran V ini dapat terealisasi 100% sampai akhir Renstra 2021 nanti.

3.1.4. Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan untuk Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas dengan target BB 76% dan terealisasi BB 75,10 dengan tingkat capaian 98,80%, Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam dengan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain : adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program dan kegiatan, melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan setiap bulannya, melakukan penyempurnaan sistem penyusunan perencanaan

Sedangkan keberhasilan Indikator Kinerja Persentase capaian Realisasi keuangan dan fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan dari target 95% terealisasi sebesar 95,6% dengan tingkat capaian 100,63%. Hal ini didukung dengan adanya kontrol yang cukup kuat oleh pimpinan dan seluruh pelaksana kegiatan, dimana setiap realisasi anggaran harus disesuaikan dengan aliran kas yang telah disusun setiap bulannya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2020 mengelola Anggaran sebesar Rp. 30.932.131.249,- yang meliputi 1). Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 22.546.169.917,- dimana realisasi keuangan sebesar 91,41% dan realisasi fisik sebesar 100%. 2). Belanja Langsung yang sebanyak 12 program yang terdiri dari 6 program dan 24 kegiatan pada Belanja Langsung Pokok dan 6 program 52 kegiatan pada belanja langsung urusan, dimana realisasi keuangan sebesar 95,60% dan realisasi fisik sebesar 99,87%. Dalam setiap monitoring yang dilakukan secara berkala setiap bulannya akan menerbitkan Nota Kepala Dinas untuk melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan dan teguran bagi pelaksana kegiatan yang capaiannya dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini juga dilakukan untuk realisasi fisik dan keuangan anggaran APBN

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas dan Indikator Kinerja Persentase capaian Realisasi fisik dan keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2020 cukup baik, hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara interen dalam mengendalikan

program pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan. Pada tahun 2020 terjadi rasionalisasi anggaran yang sangat significant, karena peristiwa pandemic COVID19 yang tidak hanya melanda Indonesia, namun juga sudah melanda dunia. Dengan adanya rasionalisasi anggaran yang cukup berdampak pada pencapaian target kinerja, maka seiring dengan itu juga telah dilakukan revisi target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu melakukan revisi anggaran dan kegiatan bagi kegiatan – kegiatan yang potensi menghambat capaian realisasi fisik dan keuangan, sehingga anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan semaksimal dan seefisien mungkin, hal ini dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 104,5% serta tingkat efisiensi dalam mencapai akuntabilitas kinerja terhadap penggunaan anggaran sebesar 95,60% sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.42 berikut :

Tabel 3.42. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	99,87%	95,60%	104,5%

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran APBD dan APBN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran APBD

Pada Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengelola dana APBD sebesar Rp. 30.932.131.249,- yang terdiri 12 Program dan 79 Kegiatan yang meliputi 1). Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 22.546.169.917,- dimana

realisasi keuangan sebesar 91,41% dan realisasi fisik sebesar 100%. 2). Belanja Langsung yang sebanyak 10 program yang terdiri dari 4 program dan 23 kegiatan pada Belanja Langsung Pokok dan 6 program 32 kegiatan pada belanja langsung dimana realisasi keuangan sebesar 95,6% dan realisasi fisik sebesar 99,87% urusan dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.43 berikut :

Tabel 3.43. Analisis Akuntabilitas keuangan. Realisasi Anggaran

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisi (%)	Keuangan (Rp)	%	
1	Belanja Tak Langsung	22.546.169.917	100	20.609.085.280	91,41	1.937.084.637,00
2	Belanja Langsung	8.385.961.332	100	8.016.870.520	95,60	369.090.812,00
	Jumlah Total	30.932.131.249,00	100	28.625.955.800	92,54	2.306.175.449,00

Pagu anggaran sebagaimana pada tabel di atas merupakan pagu anggaran APBD setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 30.932.131.249,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.625.955.800,- (92,54%) dan realisasi fisik sebesar 92,54%. Pagu Anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44. Laporan Realisasi APBD sampai dengan Desember 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

NO URLUT	JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN	DANA (Rp.)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
			FISIK %	KEUANGAN		
				(Rp.)	%	
1	3	4	6	7	8	9
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.546.169.917	100,00	20.609.085.280	91,41	1.937.084.637
	BELANJA PEGAWAI	22.546.169.917	100,00	20.609.085.280	91,41	1.937.084.637
1	Belanja Gaji dan tunjangan	14.651.842.479	100,00	13.777.594.325	94,03	874.248.154
2	Tambahan penghasilan PNS	7.883.430.821	100,00	6.831.490.955	86,66	1.051.939.866
3	Insentif pemungutan retribusi daerah	10.896.617	-	-	-	10.896.617
II	BELANJA LANGSUNG	8.385.961.332	99,87	8.016.870.520	95,60	369.090.812
A	POKOK	4.480.881.720	100,00	4.282.928.206	95,58	197.953.514
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.427.769.018	100,00	2.272.212.570	93,59	155.556.448
1	Penyediaan jasa surat menyurat	53.287.744	100,00	47.864.152	89,82	5.423.592
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	560.620.445	100,00	473.546.600	84,47	87.073.845
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	1.318.307.904	100,00	1.264.750.801	95,94	53.557.103
4	Penyediaan alat tulis kantor	80.880.200	100,00	80.742.100	99,83	138.100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47.819.125	100,00	47.613.825	99,57	205.300
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31.000.500	100,00	31.852.200	99,50	31.300
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.090.000	100,00	13.090.000	100,00	-
8	Penyediaan makanan dan minuman	48.360.000	100,00	48.355.000	99,99	5.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	208.020.100	100,00	201.862.642	96,94	6.357.458
10	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	14.600.000	100,00	14.600.000	100,00	-
11	Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	50.900.000	100,00	48.135.250	94,57	2.764.750
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.362.096.752	100,00	1.334.336.336	97,90	28.560.416
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	422.923.400	100,00	414.705.686	98,06	8.217.714
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	251.823.352	100,00	250.640.500	99,53	1.182.852
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	155.000.000	100,00	141.968.900	91,59	13.031.100
4	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelur	42.700.000	100,00	42.532.500	99,61	167.500
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan kantor	80.450.000	100,00	76.438.750	95,01	4.011.250
6	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	410.000.000	100,00	408.050.000	99,52	1.950.000
7	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA DISNAKERTRANS 2020

NO URUT	JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN	DAWA (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)	
			FISIK %	KEUANGAN		
				(Rp.)		%
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	161.250.000	100,00	156.000.000	96,74	5.250.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	161.250.000	100,00	156.000.000	96,74	5.250.000
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	528.965.950	100,00	520.379.300	98,38	8.586.650
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	52.595.000	100,00	52.595.000	100,00	-
2	Penatausahaan keuangan SKPD	284.175.000	100,00	278.700.000	98,07	5.475.000
3	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	102.235.950	100,00	99.807.250	97,62	2.428.700
4	Pengolahan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	89.960.000	100,00	89.277.050	99,24	682.950
B	URUSAN	3.905.079.612	99,73	3.733.942.314	95,62	171.137.298
(1)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.541.031.562	100,00	2.427.300.300	95,52	113.731.254
1	Uji Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan	243.000.000	100,00	212.173.593	87,31	30.826.407
2	Pelatihan Wirausaha Baru Produktif	2.840.000	100,00	2.840.000	100,00	-
3	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	100.000.000	100,00	97.236.000	97,24	2.764.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Padang Panjang	1.358.507.700	100,00	1.317.062.757	96,95	41.444.943
5	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Payakumbuh	623.109.080	100,00	606.608.850	97,35	16.500.230
6	Monitoring program pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota	44.042.000	100,00	43.854.276	99,57	187.724
7	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	150.000.000	100,00	127.992.050	85,33	22.007.950
8	Penyiapan Calon Peserta Magang ke Jepang	19.532.782	100,00	19.532.782	100,00	-
(2)	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	333.941.300	96,80	290.683.263	87,05	43.258.037
1	Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/kota dan penetapan UMP	160.000.000	100,00	128.143.100	80,09	31.856.900
2	Bimtek Struktur Skala Upah	3.941.800	100,00	3.941.800	100,00	-
3	Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan di Kab/Kota	83.128.000	100,00	83.127.363	100,00	637



LAPORAN KINERJA DISNAKERTRANS 2020

NO URUT	JURUS BELAJAR / RAMA KEGIATAN	DANA (Rp.)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
			FISIK %	KLUANGAH		
				(Rp.)	%	
4	Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan	-	-	-	-	-
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat perusahaan	73.500.000	100,00	73.500.000	100,00	-
6	Bimtek Tata Cara Pembuatan PP/PPK	-	-	-	-	-
7	Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Bipartit, Tripartit)	13.371.500	26,00	1.971.000	14,74	11.400.500
(3)	PROGRAM Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diverifikasi Usaha	175.992.800	100,00	174.149.943	98,95	1.842.857
1	Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	1.671.000	100,00	1.671.000	100,00	-
2	Bimtek Perantara Kerja dan Pembinaan antar Perantara Kerja	1.417.000	100,00	1.417.000	100,00	-
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada Calon Pencari Kerja	29.776.000	100,00	29.776.000	100,00	-
4	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
5	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	75.000.000	100,00	74.897.750	99,86	102.250
6	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	67.128.800	100,00	65.388.193	97,41	1.740.607
(4)	PROGRAM Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	523.910.000	100,00	513.731.505	98,06	10.178.495
1	Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) Di Perusahaan	-	-	-	-	-
2	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	201.000.000	100,00	197.138.080	98,08	3.861.920
3	Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan	28.000.000	100,00	27.775.300	99,20	224.700
4	Pembinaan dan Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award dan	74.800.000	100,00	74.769.100	99,96	30.900
5	Pengujian lingkungan kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja	73.060.000	100,00	72.820.000	99,67	240.000



LAPORAN KINERJA DISNAKERTRANS 2020

NO URUT	JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN	DANA (Rp.)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
			FISIK %	KEUANGAN		
				(Rp.)	%	
6	Penanganan kasus ketenagakerjaan	50.000.000	100,00	44.363.175	88,73	5.636.825
7	Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	22.400.000	100,00	22.215.850	99,18	184.150
8	Gerakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan Kab/Kota	74.650.000	100,00	74.650.000	100,00	-
(5)	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL	240.203.950	100,00	238.109.295	99,13	2.094.655
1	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi	71.000.000	100,00	70.949.650	99,93	50.350
2	Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	50.000.000	100,00	49.990.920	99,98	9.080
3	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi	61.583.000	100,00	61.583.000	100,00	-
4	Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi	9.385.350	100,00	9.385.350	100,00	-
5	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	48.235.600	100,00	46.200.375	95,78	2.035.225
(6)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	90.000.000	100,00	89.968.000	99,96	32.000
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi	90.000.000	100,00	89.968.000	99,96	32.000
	JUMLAH (I + II)	30.932.131.249	99,93	28.625.955.000	92,54	2.306.175.449

Sumber data : Disnakertrans Prov. Sumbar 2020



2. Realisasi Anggaran APBN

Dalam pencapaian target kinerja, selain melalui anggaran APBD, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera Barat juga didukung oleh anggaran APBN dari 2 Kementerian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja , program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, daerah teritinggal dan transmigrasi dengan program penyiapan kawasan dan pemukiman transmigrasi dan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengelola Anggaran APBN untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sebesar Rp. 6.899.972.000,- yang meliputi Dana Dekonsentrasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.721.538.256,- (97,96%) dan realisasi fisik sebesar 100%.Capain Fisik dan keuangan yang cuku tinggi ini sangat mendukung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, pagu anggaran APBN juga mengalami beberapa kali rasionalisasi, namun hal ini dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik dalam pencapaian kinerja Dinas. Secara rinci realisasi anggaran APBN dapat dilihat pada tabel 3.45 berikut :

Tabel 3.45. Laporan Realisasi APBN sampai dengan Desember 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	
1	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	392.997.000	100	382.362.500	97,29	10.634.500
2	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	4.519.218.000	100	4.411.279.256	97,61	107.938.744
3	Program Penylapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	339.239.000	100	333.533.100	98,32	5.705.900
4	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.608.518.000	100	1.594.363.400	99,12	14.154.600
Jumlah Total		6.899.972.000	100	6.721.538.256	97,96	138.433.744

Sumber data : Disnakertrans Prov. Sumbar 2020



3. Realisasi Anggaran PAD

Pada tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengemban Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 363.330.560 dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 275.273.063 (75,79%), secara rinci realisasi PAD dapat dilihat pada tabel 3.46 berikut :

Tabel 3.46. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020

No.	Rincian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Sewa Rumah dinas	31.672.000	29.108.962	91,91
2	Sewa Aula	25.455.600	17.300.000	67,96
3	Sewa Mess	12.800.000	-	-
4	Sewa Ruang Belajar/ Gedung	3.852.000	-	-
5	Pengujian Linakunaan Kerja	146.646.480	153.904.100	104,95
6	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	146.646.480	74.960.002	51,12
	Jumlah	363.220.560	275.273.063	75,79

Dari tabel 3.46 di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi PAD hanya 75,79%. Tidak tercapainya target PAD ini disebabkan karena antara lain : 1). Kondisi pandemi COVID19 yang menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pembatasan dalam melakukan pengusulan pengujian/pemeriksaan SMK3, uji riksa, 2). Sewa Mess yang juga tidak dapat terealisasi karena COVID-19 sehingga tidak ada yang menyewa dan kemudian adanya MOU antara Pemerintah Provinsi dengan Universitas Muhammadiyah terkait penyewaan gedung Mess Balatrans dalam jangka waktu tertentu, 3). Adanya rasionalisasi perjalanan dinas untuk melakukan pengujian diperusahaan-perusahaan sehingga kegiatan pengujian tidak bisa dilaksanakan.

BAB. IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun berdasarkan Laporan Kinerja yang disusun oleh organisasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Secara umum capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 sangat baik (> 100%) dengan rata – rata capaian sebesar 112,55%. Hal ini tentunya didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan baik APBD maupun APBN yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, maka hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Pengurangan Angka Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat tahun 2018 sd 2020

No.	Provinsi	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %		
		2018	2019	2020
1	Sumatera Barat	5.66	5.38	6.88

Sumber data : BPS Prov. Sumbar

Terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat tahun 2020 sekitar 1,5 % dari tahun 2019.

2. Peningkatan Angka Partisipasi (TPAK)

Tabel 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat tahun 2019 sd 2020

No.	Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %		Peningkatan (%)
		2019	2020	
1	Sumatera Barat	67.88	69.01	1.13

Sumber data : BPS Prov. Sumbar

Membbaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Periode Agustus 2020 Sumatera Barat mencapai 2,77 juta orang atau terjadi Kenaikan Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 87,74 ribu (sekitar 1.13 %) orang dibandingkan Agustus 2019 yang tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .

3. Jumlah Angkatan Kerja

Tabel 4.3. Jumlah Angkatan kerja Sumatera Barat tahun 2019 sd 2020

No.	Provinsi	Jumlah Angkatan Kerja (juta Jiwa)		Peningkatan (%)
		2019	2020	
1	Sumatera Barat	2684.39	2772.13	87,74

Sumber data : BPS Prov. Sumbar

Terjadi peningkatan Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 87,74 % pada tahun 2020 dari tahun 2019.

4. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Tabel 4.4. Data Kelembagaan Hubungan Industrial Sumatera Barat tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Perusahaan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan	2095
2	Perusahaan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah di daftarkan	506
3	Perusahaan yang memiliki lembaga kerja sama Bipartit	97
4	Perusahaan yang memiliki lembaga kerja sama Tripartit	16
5	Kasus perselisihan hubungan industrial	78

Sumber data : Bid. HI/WAS Disnakertrans Prov. Sumbar 2020

5. Peningkatan Upah Minimal Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi melalui Keputusan Gubernur paling lambat tanggal 1 November setiap tahunnya. Dengan peningkatan rata – rata 8,3% per tahun

Tabel 4.5. Data Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

Tahun	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Dasar
2019	2.289.228,00	Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-795-2018 Tanggal 30 Oktober 2018
2020	2.484.041,00	Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-827-2019 Tanggal 29 Oktober 2019
2021	2.484.041,00	Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-600-2020 Tanggal 31 Oktober 2020

Sumber data : Bid. HI/WAS Disnakertrans Prov. Sumbar 2020

6. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mendapatkan 2 (dua) penghargaan Untuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Integra) Bidang Hubungan Industrial dan Pelatihan dan Kompetensi Kerja. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja.



Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat masih ditemui sejumlah kendala/permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga Pengawasan dalam melakukan kegiatan pengawasan ke perusahaan.
2. Masih belum optimalnya SDM calon pencari kerja baik untuk pelaksanaan pemagangan dalam dan luar negeri.
3. Masih terbatasnya jumlah Instruktur yang kompeten dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan permintaan pasar kerja
4. Masih belum optimalnya dukungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penganggaran program dan kegiatan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sinkronisasi dan Sinergisitas Program /Kegiatan dengan pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota.
2. Meningkatkan SDM masyarakat dan pencari kerja dalam hal ini melakukan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang sesuai dengan pasar kerja.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan dalam penerapan Peraturan – Perundang Undangan ketenagakerjaan dan meningkatkan perlindungan Tenaga kerja dalam upaya menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan
4. Memfasilitasi Sarana dan prasarana dikawasan Transmigrasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan warga transmigran.

5. Meningkatkan SDM Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan melalui Bimtek dan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja.
6. Meningkatkan SDM Tenaga Fungsional Instruktur dan Pengantar Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
7. Meningkatkan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
8. Melakukan pembinaan dan Pelatihan terhadap masyarakat guna meningkatkan Tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing.
9. Meningkatkan Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) melalui peningkatan Sarana dan prasarana yang representativ.

2. Saran

Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama antar berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk

- Perbaiki perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
- Meningkatkan Koordinasi teknis dengan instansi terkait, perencanaan pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu sehingga dapat menghasilkan pekerjaan lebih optimal, tepat sasaran dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini kami buat sebagai bahan Pertanggungjawaban terhadap pencapaian Target Kinerja SKPD dan pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang telah dicapai berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku dan semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 29 Januari 2021

KEPALA DINAS,

NAZRIZAL, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700114 198902 1 001

